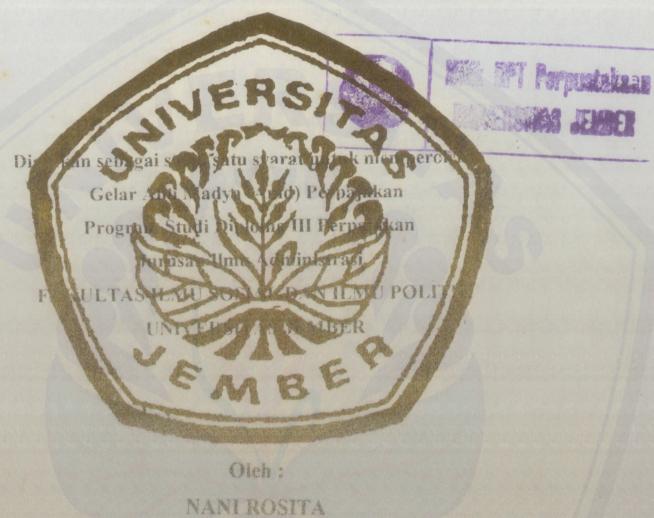
TATA CARA PEMOTONGAN, PENYETORAN DAN PELAPORAN
PAJAK PENGHASILAN PASAL 4 AYAT (2) ATAS SEWA TANAH
DI PT. PERKEBUNAN NUSANTARA X (PERSERO) KEBUN AJONG
GAYASAN – JEMBER

LAPORAN HASIL PRAKTEK KERJA NYATA



NIM: 010903101063

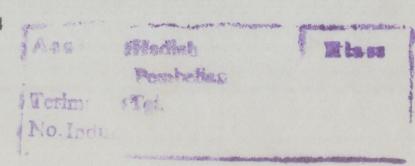
Pembimbing

Drs. AGUS BUDIHARDJO, MA

NIP. 130879634

UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
JURUSAN ILMU ADMINISTRASI
PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERPAJAKAN

2004



# UNIVERSITAS JEMBER FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK JURUSAN ILMU ADMINISTRASI PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERPAJAKAN

#### PERSETUJUAN

Telah disetujui Laporan Hasil Praktek Kerja Nyata Program Studi Diploma III Perpajakan Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember:

Nama : Nani Rosita

NIM : 010903101063

Jurusan : Ilmu administrasi

Program Studi : Diploma III Perpajakan

Judul

TATA CARA PEMOTONGAN, PENYETORAN DAN PELAPORAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 4 AYAT (2) ATAS SEWA TANAH DI PT. PERKEBUNAN NUSANTARA X (PERSERO) KEBUN AJONG GAYASAN - JEMBER

Jember, 11 Juni 2004

Menyetujui

Dosen Pembinibing

Drs. AGUS BUDIHARDJO, MA

NIP. 130 879 634

## UNIVERSITAS JEMBER FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN POLITIK JURUSAN ILMU ADMINISTRASI PROGRAM STUDI ILMU PERPAJAKAN

#### **PENGESAHAN**

Telah dipertahankan dihadapan sidang Panitia Penguji Laporan Hasil Praktek Kerja Nyata Program Studi Diploma III Perpajakan Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas IlmuSosial Dan Ilmu Politik Universitas Jember

Nama : Nani Rosita
NIM : 010903101063
Jurusan : Ilmu Administrasi
Program Studi : Diploma III Perpajakan

TATA CARA PEMOTONGAN, PENYETORAN DAN PELAPORAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 4 AYAT (2) ATAS SEWA TANAH DAN DI PT. PERKEBUNAN NUSANTARA X (PERSERO) KEBUN AJONG GAYASAN – JEMBER

Hari : Rabu

Tanggal : 30 Juni 2004

Jam : 19.00

Bertempat : Di FISIP Universitas Jember

Dan telah dinyatakan lulus

Panitia Penguji

1. Drs. Totok Supriyanto

NIP: 130 605 111

(Ketua)

2. Drs. Agus Budihardjo, MA

NIP: 130 879 634

(Sekretaris)

Mengesahkan
Universitas Jember
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Dekan

Drs. H. MOCH. TOERKI

#### Kata Pengantar

Puji syukur Alhamdulillah ku panjatkan ke-Hadirat Allah SWT atas Ridlo serta limpahan Rahmat-Nya dan juga atas kekuatan dan ketabahan yang telah Allah SWT berikan kapada penulis, sehingga laporan tugas akhir ini dapat terselesaikan dengan baik. Laporan ini berjudul " Tata Cara Pemotongan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 4 Ayat (2) Di PT. Perkebunan Nusantara X Kebun Ajong — Gayasan Jember", yang disusun guna memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan Pendidikan Program Studi Diploma III Perpajakan Jurusan Ilmu Administrasi pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.

Pada kesempatan ini saya ucapkan terima kasih atas bantuan dan bimbingannya dalam penulisan laporan ini, terutama kepada:

- 1. Drs. H. Moch. Toerki, selaku Dekan Faultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.
- 2. Drs. Ardiyanto, M.Si, selaku Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Jember.
- 3. Drs. Akhmad Toha, M.Si, selaku Ketua Program Studi Diploma III Perpajakan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.
- 4. Drs. Agus Budihardjo, MA, selaku Dosen Pembimbing Laporan Tugas Akhir PKN. Terima kasih atas bimbingannya.
- 5. Drs. Poerwowibowo, M.Si, selaku Dosen Pembimbing Akademik.
- 6. Ir Sugianto, selaku Administratur PT. Perkebunan Nusantara X (Persero) Kebun Ajong Gayasan Jember.
- 7. Bapak Cholil, selaku Staf Sumber Daya Manusia PT. Perkebunan Nusantara X (Persero) terima kasih atas bantuannya.
- 8. Bapak Subur, selaku Kepala Seksi Pengadaan Barang PT. Perkebunan Nusantara X (Persero) Kebun Ajong Gayasan Jember
- 9. Bapak Samsul Hadi, selaku staf Pengadaan Barang bagian Perpajakan dan Asuransi yang telah memberikan bimbingan dan bantuan dalam menyelesaikan laporan ini.

- 10. Seluruh staf dan karyawan PT. Perkebunan Nusantara X (Persero) Kebun Ajong Gayasan Jember (Pak Irfan dan Pak Cip) terima kasih atas bantuannya.
- 11. Kawan-kawanku di Jawa VIII (Indit, Pipit, Tatik, Nurul, Anik, Sofa, Ika, Ainun, Nana) atas dukungan dan keceriaan selama dua tahun kost di Jawa.
- 12. Kawan-kawan kost di Bangka VIII (Rosi, Yeti, Ria, Mbak Elok, Mbak Fitri, Mbak Nia, Mbak Nita) atas hari-hari yang indah.
- 13. Satria Pandu Utama, bantuanmu takkan kulupakan.
- 14. Kawan-kawan D III Perpajakan (kelas A) yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Akhirnya penulis berharap semoga laporan ini bermanfaat bagi semua pihak yang berkepentingan.

Jember, 11 Juni 2004

Penulis

#### MOTTO

Mempelajari sepatah kata ilmu, lebih baik daripada mengerjakan sholat seratus raka'at.

Al-Hadist

Jangan membayar pajak karena takut sanksi tetapi bayarlah pajak karena ingin menjadi warga negara yang baik
Bersama anda membangun bangsa

Dirjen Pajak

#### PERSEMBAHAN

Laporan ini kupersembahkan kepada:

- 1) Kedua orang tuaku tercinta, Bapak Sunar Djojo Diwirjo dan Ibu Widatmiati yang selalu memberikan cinta kasih dan doanya.
- 2) Kedua kakakku, Mbak Yanti, Mbak Ani yang cerewet.
- 3) Mas Ulung, kamu yang terbaik
- 4) Teman-temanku Ari, Agung, Hari, Erwin, Agus, Eko, Reza yang telah menemaniku dalam suka dan duka, kalian tidak ada duanya. Kalian memberi warna dalam hidupku
- 5) Teman-teman angkatan 2001 kelas A tempat berbagi ilmu dan kebahagiaan.
- 6) Almamaterku yang tercinta.

#### DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN.	iii
KATA PENGANTAR	iv
MOTTO.	vi
PERSEMBAHAN.	vii
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR GAMBAR	X
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR LAMPIRAN	xii
I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Tujuan dan Kegunaaan Praktek Kerja Nyata	3
1.2.1 Tujuan Praktek Kerja Nyata	3
1.2.2 Kegunaan Praktek Kerja Nyata	3
1.3 Lokasi dan Waktu Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata	4
1.3.1 Lokasi Praktek Kerja Nyata	14
1.3.2 Waktu Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata	4
1.4 Bidang Ilmu	1 5
1.5. Konsep Perpajakan	5
II GAMBARAN UMUM	
PT. PERKEBUNAN NUSANTARA X (PERSERO)	9
2.1 Sejarah Singkat Perusahaan	9
2.2 Struktur Organisasi	12
2.3 Uraian Tugas	14
2.4 Tenaga Kerja	16
2.5 Jadwal Kerja	17

	2.6	Sistem Penggajian	18
III	PEL	AKSANAAN PRAKTEK KERJA NYATA	19
	3.1	Deskripsi Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata	19
		3.1.1 Kegiatan Praktek Kerja Nyata di PT. Perkebunan	
		Nusantara X (Persero)	20
	3.2	Hasil Praktek Kerja Nyata	23
		3.2.1 Dasar Hukum Pengenaan	
		PPh pasal 4 ayat (2)	22
		3.2.2 Tata Cara Pemotongan	23
		3.2.3 Tata Cara Pelunasan	24
	3.3	Sistem Perpajakan di	
		PT. Perkebunan Nusantara X	24
		3.3.1 Pelaksanaan PPh pasal 4 ayat (2) di PT. Perkebunan	
		Nusantara X (Persero)	25
		3.3.2 Pelaksanaan Sewa Tanah di PT. Perkebunan Nusantara X	
		(Persero)	25
		3.3.3 Contoh Penghitungan PPh Pasal 4 Ayat (2)	26
		3.3.4 Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2)	26
		3.3.5 Penyetoran Pajak Penghasilan Pasal 4 Ayat (2)	
		di Bank Persepsi	27
		3.3.6 Pelaporan pada Kantor Pelayanan Pajak	28
	3.4	Penilaian Terhadap PT. Perkebunan Nusantara X (Persero)	
		Kebun Ajong Gayasan Jember	29
IV	PEN	UTUP	31
	4.1	Kesimpulan	31
	4.2	Saran	30
DAF	TAR	PUSTAKA	
LAN	1PIRA	N	

#### DAFTAR GAMBAR

Gamb	par	Hal
1.	Struktur Organisasi PT. Perkebunan	
	Nusantara X (Persero)	13

#### DAFTAR TABEL

TABI	EL	Hal
1.	Jenis Pegawai PT. Perkebunan Nusantara X (Persero)	
	Kebun Ajong Gayasan Jember.	16
2.	Jadwal Jam Kerja PT. Perkebunan Nusantara X (Persero) Kebun	
	Ajong Gayasan Jember	17
3.	Daftar Kegiatan Praktek Kerja Nyata	21
4.	Daftar kepatuhan Pembayaran dan Pelaporan	
	PPh Pasal 4 ayat 2	30

#### DAFTAR LAMPIRAN

Lamp	iran:	Hal
1.	Surat Permohonan Praktek Kerja Nyata	34
2.	Surat ijin Praktek kerja Nyata	35
3.	Surat Tugas Praktek Kerja Nyata	36
4.	Surat Keterangan Praktek Kerja Nyata	37
5.	Daftar Hadir Kegiatan Praktek Kerja Nyata	38
6.	Daftar Kegiatan Konsultasi/Bimbingan Laporan Akhir	39
7.	Gambar Pengukuran Lahan	40
8.	Bukti Pembayaran IPL Tembakau.	41
9.	Lampiran Surat Pernyataan Penyerahan	
	dan Penggarapan Lahan	42
10	. Daftar Permintaan Uang.	43
11	. Bukti Penerimaan Surat	44
12	. Daftar Bukti Pemotongan/Pemungutan PPh Pasal 4 ayat (2)	
	Masa Februari 2004	45
13	Surat Pemberitahuan SPT Masa PPh pasal 4 ayat (2)	46
14	. Bukti Pemotongan Pajak Penghasilan Atas Persewaan Tanah	47
	Dan Atau Bangunan (Final)	
28	Surat Setoran Pajak	61

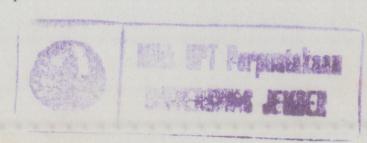
#### I. PENDAHULUAN

#### 1.1 Latar Belakang

Pajak ialah iuran wajib rakyat kepada negara tanpa kontraprestasi langsung yang pada pelaksanaannya dapat dipaksakan berdasarkan Undang-Undang. Pajak bukan hanya sebagai sumber pendapatan Negara (fungsi budgetair) yang potensial bagi suksesnya pembangunan nasional, tetapi keberadaan pajak memiliki fungsi yang vital bagi kehidupan bangsa Indonesia yaitu sebagai sarana untuk mengukur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi (fungsi regulerend) hal ini dapat kita tinjau dari segi penetapan besar kecilnya tarif pajak terhadap suatu barang atau penghasilan.

Pemerintah berusaha meningkatkan penerimaan negara dari sektor pajak oleh karena itu pemerintah harus berupaya melakukan pembenahan dibidang perpajakan diantaranya intensifikasi dan ekstensifikasi perpajakan. Intensifikasi perpajakan yang dimaksud antara lain melalui pembaharuan sistem perpajakan nasional (tax reform) yang meliputi Perundang-Undangan Perpajakan, meningkatkan mutu sumber daya manusia di bidang perpajakan serta peningkatan pelayanan pajak dengan memberikan kemudahan sarana dan fasilitas-fasilitas perpajakan.

Intensifikasi tersebut dapat dilihat dengan adanya perubahan nyata sistem perpajakan dari Official Assessment System menjadi Self Assessment System yang membawa pengaruh sangat berarti yaitu sistem perpajakan yang memberikan kepercayaan penuh kepada wajib pajak untuk menghitung, menyetor, melaporkan sendiri pajak yang terutang sehingga melalui sistem ini administrasi perpajakan diharapkan dapat dilaksanakan dengan lebih sederhana, rapi, terkendali dan mudah dipahami anggota masyarakat, wajib pajak. Penyempurnaan perubahan undang-undang perpajakan yang telah dilakukan pemerintah disebabkan peraturan perpajakan yang lama sudah tidak mampu lagi menjawab permasalahan-permasalahan yang ada seiring dengan perkembangan jaman dan teknologi. Sedangkan ekstensifikasi perpajakan yang dimaksud adalah meliputi penggalian



atau perluasan bidang Perpajakan. Artinya penggalian obyek pajak seluas-luasnya melalui peran serta dan kesadaran masyarakat dalam membayar pajak. Intensifikasi dan ekstensifikasi perpajakan diharapkan dapat meningkatkan penerimaan pajak terutama untuk pajak pusat yang diantaranya adalah Pajak Penghasilan meliputi salah satunya Pajak Penghasilan atas sewa tanah dan atau bangunan yang dinilai sangat potensial bagi penerimaan kas negara.

Perkebunan Nusantara X (Persero) Kebun Ajong Gayasan Jember merupakan sebuah Badan Usaha Milik Negara yaitu badan usaha yang bergerak dibidang pengelolaan tembakau yang telah melakukan kegiatan produksinya sejak tahun 1957 dengan tenaga kerja sekitar 500 orang karyawan termasuk suatu usaha yang berskala besar. Selain memproduksi tembakau yang akan diperjual belikan (kegiatan ekspor 50% dari total pemasaran) dan importpun dilakukan untuk memenuhi kebutuhan PT. Perkebunan Nusantara X (Persero) Kebun Ajong Gayasan Jember. Keadaan seperti itu mengakibatkan PT. Perkebunan Nusantara X Kebun Ajong Gayasan Jember telah dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak dan diberi Nomor Pengukuhan Kena Pajak (NPPKP) yang berfungsi untuk mengetahui identitas pengusaha kena pajak sebenarnya.

Sebelum melakukan pengelolaan tembakau PT. Perkebunan Nusantara X (Persero) Kebun Ajong Gayasan Jember terlebih dahulu melakukan proses penanaman. Proses ini mengakibatkan terjadinya sewa menyewa tanah antara perusahaan dengan petani. Berdasarkan proses sewa menyewa tersebut maka diberlakukan Pajak Penghasilan pasal 4 ayat (2) atas sewa menyewa tanah di PT. Perkebunan Nusantara X (Persero) Kebun Ajong Gayasan Jember. Berdasarkan latar belakang tersebut maka judul laporan ini adalah "Tata Cara Pemotongan, Peyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 4 Ayat (2) Atas Sewa Tanah dan atau Bangunan PT. Perkebunan Nusantara X (Persero) Kebun Ajong Gayasan Jember". Penulis memilih judul laporan tersebut dengan alasan sebagai berikut:

- a. Cara penghitungan Pajak Penghasilan pasal 4 ayat (2) lebih mudah untuk dimengerti dibandingkan dengan jenis pajak yang lainnya.
- b. Kemudahan dalam memperoleh data-data mengenai Pajak Penghasilan pasal 4 ayat (2).

Pelaksanaan kegiatan Praktek Kerja Nyata (PKN) ini penulis memilih PT. Perkebunan Nusantara X (Persero) Kebun Ajong Gayasan Jember sebagai tempat untuk melaksanakan kegiatan dengan pertimbangan bahwa PT. Perkebunan Nusantara X (Persero) Kebun Ajung Gayasan Jember merupakan salah satu Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di Jember yang ditunjuk sebagai pemungut Pajak Penghasilan.

#### 1.2 Tujuan dan Kegunaan Praktek Kerja Nyata

1.2.1 Tujuan Praktek Kerja Nyata

Tujuan dari Praktek Kerja Nyata Ini adalah:

- a. Untuk mengetahui dan memperoleh gambaran secara riil tentang kewajiban perpajakan pada PT. Perkebunan Nusantara X (Persero) Kebun Ajong Gayasan Jember khususnya pelaksanaan pemotongan, penyetoran dan pelaporan Pajak Penghasilan pasal 4 ayat (2) yang dilakukan perusahaan sebagai pemungut Pajak Penghasilan.
- b. Untuk mengenal lingkungan kerja perusahaan dan lingkungan kemasyarakatan sehingga menambah wawasan serta pemahaman sistem perpajakn di PT Perkebunan Nusantara X (Persero).

#### 1.2.2 Kegunaan Praktek Kerja Nyata

Kegunaan dari Praktek kerja ini adalah sebagai berikut:

a. Untuk memperoleh pengalaman secara langsung mengenai pelaksanaan kegiatan perpajakan pada PT. Perkebunan Nusantara X (Persero) Kebun Ajong Gayasan Jember.

- b. Untuk menambah pengetahuan tentang tata cara pemungutan, penyetoran dan pelaporan Pajak Penghasilan pasal 4 ayat (2) pada PT. Perkebunana Nusantara X (Persero) Kebun Ajong Gayasan Jember.
- c. Sebagai referensi bagi penulisan laporan Praktek Kerja Nyata berikutnya, Khususnya yang berkenaan dengan Pajak Penghasilan pasal 4 ayat (2).
- d. Sebagai sarana hubungan kerjasama antara Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Jember dengan PT. Perkebunan Nusantara X (Persero) Kebun Ajong Gayasan Jember.

#### 1.3 Lokasi dan Waktu Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata.

#### 1.3.1. Lokasi Praktek Kerja Nyata

Kegiatan Praktek Kerja Nyata dilaksanakan pada PT. Perkebunan Nusantara X (Persero) Kebun Ajong Gayasan Jember yang beralamatkan di Jl. M. H. Thamrin No 143 Ajung Gayasan Jember. Bertempat diseksi pengadaan barang bagian asuransi dan perpajakan penulis melaksanakan Praktek Kerja Nyata tersebut selama waktu yang telah ditentukan.

#### 1.3.2. Waktu Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata

Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata sebagaimana yang telah ditetapkan oleh PT. Perkebunan Nusantara X (Persero) Kebun Ajong Gayasan Jember dimulai pada tanggal 1 Maret sampai dengan 31 Maret 2004. Jam kerja yang dilaksanakan adalah sebagai berikut:

- a. Hari Senin sampai dengan Kamis jam 07.00 14.00.
- b. Hari Jum'at mulai jam 07.00 11.00.
- c. Hari Sabtu mulai jam 07.00 12.00
- d. Hari Minggu libur.

#### 1.4 Bidang Ilmu

Bidang ilmu yang dipakai penulis sebagai landasan tertulis dalam rangka pelaksanaan Praktek Kerja Nyata adalah Undang-Undang No 17 Tahun 2000, tentang Pajak Penghasilan dan Perpajakan edisi revisi tahun 2004 oleh Mardiasmo. Berita-berita pajak yang diterbitkan oleh Direktorat Jendral Pajak beserta peraturan-peraturan perpajakan yang terbaru oleh penulis terus diikuti perkembangannya supaya dalam menyusun laporan akhir ini penulis dapat menyajikan data-data yang terbaru.

#### 1.5 Konsep Perpajakan

a. Pengertian Perpajakan Secara Umum

Menurut Soemitro (dalam Mardismo, 2004:1), Pajak adalah:

- " luran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang ( yang dapat dipaksakan) dengan tiada jasa timbal yang langsung dapat ditujukan dan yg digunakan untuk membayar pengeluaran umum". Pengertian tersebut mengandung unsur
- 1) luran dari rakyat kepada negara, yang berhak memungut pajak hanyalah negara yang mana iuran tersebut berupa uang
- 2) Pajak dipungut berdasarkan atau dengan kekuatan undang-undang untuk mengatur pelaksanaannya.
- 3) Tanpa jasa timbal atau kontraprestasi langsung dari negara yang secara langsung dapat dinikmati oleh rakyat.
- 4) Digunakan untuk membiayai rumah tangga negara yakni pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat luas.
- b. Pengertian Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2)

Keputusan Dirjen Pajak No KEP-227/PJ/2002, yang dimaksud Pajak Penghasilan pasal 4 ayat (2) atas nilai persewaan tanah dan bangunan adalah semua jumlah pajak yang dibayarkan atau terutang oleh pihak yang menyewa dengan nama dan dalam bentuk apapun yang berkaitan dengan tanah dan atau

bangunan yang disewa, termasuk biaya perawatan, biaya pemeliharaan, biaya keamanan dan *service charge*, jasa timbal balik, baik yang perjanjiannya dibuat terpisah maupun disatukan dengan persewaan yang bersangkutan.

c. Pemotong Pajak Penghasilan pasal 4 ayat (2)

Pemotong PPh pasal 4 ayat (2) adalah pihak-pihak yang membayarkan penghasilan sewa, yang terdiri atas:

- 1) Badan Pemerintahan.
- 2) Subjek pajak badan dalam negeri.
- 3) Penyelenggara kegiatan.
- 4) Bentuk usaha tetap.
- 5) Perwakilan perusahaan luar negeri.
- 6) Orang pribadi sebagai wajib pajak dalam negeri yang telah mendapat penunjukan dari Direktorat Jendral Pajak untuk memotong PPh pasal 4 ayat (2).
- d. Subjek PPh pasal 4 ayat (2)

Subjek PPh pasal 4 ayat (2) adalah orang pribadi atau badan yang menyewakan atau penyewa tanah dan atau bangunan berupa tanah, rumah susun, apartemen, ruko, toko, kondominium, gedung perkantoran, gedung pertokoan atau gedung pertemuan termasuk bagiannya, rumah kantor, gedung dan bangunan industri.

e. Objek Pemotongan PPh pasal 4 ayat (2)

Penghasilan yang dipotong PPh pasal 4 ayat (2) adalah:

- 1) Pengalihan hak atas tanah dan atau bangunan, bila pemilik:
  - a) Orang pribadi.
  - b) Badan selain anggota REI.
  - c) Anggota REI.
- 2) Persewaan tanah dan atau bangunan, milik:
  - a) Orang pribadi.

- b) Badan.
- 3) Jasa kontruksi oleh Pengusaha Jasa Konstruksi Kecil (pengadaan tidak lebih dari Rp. 1. 000.000.000,-), untuk:
  - a) Pelaksanaan konstruksi, termasuk perawatan atau pemeliharaan atau perbaikan bangunan.
  - b) Perencanaan dan pengawasan konstruksi.
- f. Dasar Tarif Pemotongan Pajak Penghasilan pasal 4 ayat

Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan No 120/KMK.03/2002 dan dipertegas dengan Keputusan Direktorat Jenderal Pajak No KEP-227/PJ/2002 Tentang Tata Cara Pemotongan dan Pembayaran serta Pelaporan Pajak Penghasilan atas Sewa Tanah dan atau Bangunan sebagai berikut:

- 1) Kontrak atau perjajian sewa di tandatangani sebelum Bulan Mei 2002 dan pelaksanaan dilaksanakan sebelum Bulan Mei 2002, maka atas penghasilan yang diterima atau diperoleh wajib pajak badan dari persewaan tanah dan atau bangunan dikenakan tarif sebesar 6% (enam persen) dari nilai persewaan.
- 2) Kontrak atau perjanjian sewa di tandatangani sebelum Bulan Mei 2002 tetapi pelaksanaannya setelah Bulan April 2002, maka atas penghasilan yang diterima atau diperoleh wajib pajak badan dari persewaan tanah dan atau bangunan dikenakan tarif sebesar 10% (sepuluh persen) dari nilai persewaan.
- 3) Kontrak atau perjanjian sewa di tanda tangani dan pelaksanaannya setelah bulan April 2002, maka atas penghasilan yang diterima atau diperoleh wajib pajak badan dari persewaan tanah dan atau bangunan dikenakan tarif sebesar 10% dari jumlah bruto nilai persewaan:

PPh Final = 10% x Jumlah Bruto Nilai Persewaan

#### g. Sanksi

Berdasarkan Undang-Undang Perpajakan No 17 tahun 2000, sanksi administrasi 2% setiap bulan atas keterlambatan penyetoran PPh terutang dan denda Rp 50.000,- atas keterlambatan pelaporan. Undang-Undang No 16 tahun

2000 Ketentuan Umum Perpajakan (KUP) pasal 14 ayat 3, sanksi administrasi 2% sebulan untuk jangka waktu paling lambat 24 bulan sejak tanggal pembayaran yang menyebabkan kelebihan pembayaran pajak sampai dengan diterbitkannya keputusan keberatan. Sanksi pidana kurungan paling lama satu tahun dan denda paling banyak dua kali jumlah pajak yang tidak atau kurang bayar.

#### h. Surat Setoran Pajak

Pasal 1 Undang-Undang No 16 tahun 2000 tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan menyebutkan bahwa Surat Setoran Pajak (SSP) adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melakukan pembayaran atau penyetoran pajak yang terutang ke kas negara melalui Kantor Pos dan Giro atau Bank Persepsi yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan. Surat Setoran Pajak dibuat rangkap lima yaitu lembar pertama untuk arsip wajib pajak, lembar kedua untuk Kantor Pelayanan Pajak, lembar ketiga untuk dilaporkan wajib pajak ke Kantor Pelayanan Pajak, lembar keempat untuk Bank Persepsi, lembar kelima untuk arsip wajib pungut atau pihak lain.

#### i. Surat Pemberitauan (SPT)

Pasal I Undang-Undang No 16 tahun 2000, Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan menyebutkan bahwa pengertian Surat Pemberitahuan adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan atau pembayaran pajak, obyek pajak dan atau bukan obyek pajak dan atau harta dan kewajiban menurut ketentuan peraturan perundang-undangan Perpajakan. Surat Pemberitahuan (SPT) menurut Undang-Undang No 16 Tahun 2000 ini dibedakan menjadi dua yaitu:

- 1) SPT Masa adalah surat pemberitahuan untuk suatu masa pajak.
- 2) SPT Tahunan adalah surat pemberitahuan untuk suatu tahun pajak

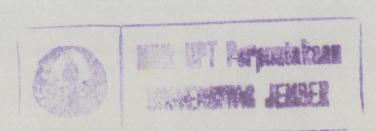
## II. GAMBARAN UMUM PT PERKEBUNAN NUSANTARA X (PERSERO)

#### 2.1 Sejarah Singkat Perusahaan.

Badan Usaha Milik Negara adalah suatu usaha yang didirikan oleh negara yang bekerjasama dengan pihak swasta. PT. Perkebunan Nusantara X (Persero) Kebun Ajong Gayasan Jember termasuk salah satu Badan Usaha Milik Negara berarti modal yang dimilii merupakan gabungan antara swasta dengan pemerintah, secara otomatis PT. Perkebunan Nusantara X (Persero) adalah lembaga yang ditunjuk sebagai pemungut pajak termasuk juga Pajak Penghasilan dalam hal ini jelas dinyatakan dalam Undang-undang Pajak Penghasilan.

Perusahaan ini didirikan dan dikuasai oleh bangsa Indonesia, merupakan warisan peninggalan dari penjajah Belanda yang banyak membawa manfaat bagi bangsa Indonesia. Sebelum dikuasi bangsa Indonesia nama dan bentuk perusahaan berbeda-beda berikut ini adalah sejarah singkat dan nama-nama sebelum PT. Perkebunan Nusantara X (Persero)

- a. Masa Pra Nasionalisasi (Sebelum Kemerdekaan) merupakan *Ordeneming* milik Belanda antara lain:
- 1) Pada mulanya Tembakau Besuki Naoogst diusahakan oleh petani di lahan tegalan atas perintah Belanda disana didirikan perkebunan tembakau Land Bbouw Maatschapp Oud Djember (LMOD) setelah itu berganti nama,
- 2) Land Bouw Maaksschappy Soekowono (LMS) terakhir diganti nama,
- 3) Besuki Tabak Maatschapy (BTM).
- b. Setelah masa kemerdekaan diubah secara berurutan menjadi:
- 1) Pada tahun 1957 dengan nama PPN (Perusahaan Perkebunan Negara) melalui SK Menteri Pertanian Republik Indonesia 229/UM/57/tanggal 10 Desember 1957, setelah berjalan kurang lebih 2 (dua) tahun, sekitar tahun 1959 diubah lagi menjadi,
- 2) PRAE tembakau, nama inipun tidak berjalan lama karena 3 (tiga) tahun kemudian, tahun 1961 diubah lagi dengan nama,



- 3) Perusahaan Perkebunan Negara Kesatuan IX (PPN Kesatuan IX) perubahan ini didasari dengan PP No 173 tahun 1961 tanggal 26 April 1961, tentang pembentukan Perusahaan Perkebunan Tembakau Negara Kesatuan Jatim IX (PPN baru Jatim IX), setelah berjalan kurang lebih 3 (tiga) tahun PPN Kesatuan IX dipecah dengan alasan untuk efisiensi perusahaan. Nama-nama baru tersebut adalah:
  - a) Perusahaan Perkebunan Tembakau Negara Besuki V dan Perusahaan Perkebunan Tembakau Negara Besuki VI pada tahun 1968 melalui PP No 07 tahun 1968 tanggal 14 April 1968, tentang Perkebunan Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Perkebunan XXVII. Diubah lagi menjadi,
  - b) Perusahaan Negara Perkebunan XXIV, setelah itu nama perusahaan diubah lagi dengan nama,
  - c) Perusahaan Negara Perkebunan XXVII dengan PP No 14 tahun 1972 tanggal 22 Febuari 1972, tentang pendirian/pembentukan Perkebunan Negara Tembakau V dan VI. Pada masa inilah perusahaan negara mendapat keuntungan yang cukup besar dan perusahaanpun maju dalam segala hal baik manajemen maupun keuangan, akan tetapi hal ini tidak berjalan lama beberapa tahun kemudian Perusahaan Negara Perkebunan XXVII mengalami kemrosotan tajam hal tersebut disebabkan antara lain oleh tidak efisiensinya tenaga kerja yang jumlahnya terlalu banyak oleh sebab itu pihak perusahaan melakukan perampingan jumlah tenaga kerja kurang lebih 1000 orang tenaga kerja yang di Putus Hubungan Kerja. Sejak itu nama dan manajemen diubah dengan nama PT. Perkebunan Nusantara XXVII,
  - d) Pada tahun 1990 sampai dengan tahun 1994 PT. Perkebunan Nusantara XXVII (Persero) mengadakan kontrak manajemen dengan PT. Perkebunan Nusantara XXI dan XXII (Persero) sekaligus sebagai Dewan Komisaris dan Direksi PT. Perkebunan Nusantara XXVII (Persero) yang berkedudukan di Surabaya. Sedangkan yang berada di perkebunan sebagai pemimpin puncak PT. Perkebunan Nusantara XXVII di jabat oleh seorang Direksi.

- e) Selanjutnya tahun 1995 sampai dengan tahun 1996 PT. Perkebunan Nusantara (Persero) XXVII bergabung dengan PT. Perkebunan Nusantara kelompok Jawa Tengah yang terdiri dari PT. Perkebunan Nusantara XV, XVI, XIX, XXI-XXII dan XXVII, Komisaris dan Direksi PT. Perkebunan Nusantara XXI-XXVII Jember di pimpin oleh kuasai Direksi yang berkedudukan di Jember.
- Perkebunan Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Perkebunan XXI XXII dan perusahaan perseroan (Persero) PT. Perkebunan XXVII menjadi Perseroan (Persero) PT. Perkebunan Nusantara X. Dilakukan restrukturisasi dan perampingan nama Badan Usaha Milik Negara, maka terjadilah peleburan antara PT. Perkebunan Nusantara XIX, XXI-XXII dan XXVII menjadi PT. Perkebunan Nusantara X (Persero) Kebun Ajung Gayasan Jember yang berkantor pusat di Surabaya, Jawa Timur dengan Akta Pendirian No 43 tanggal 11 Maret 1996 yang dibuat dihadapan notaris di Jakarta dan sejak tahun 1996 tepatnya tanggal 20 Juni 1996 PT. Perkebunan Nusantara X (Persero) Kebun Ajung Gayasan Jember dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak.
- c. Dasar Hukum Pendirian PT. Perkebunan Nusantara X (Persero)

Secara terperinci dasar hukum yang melatarbelakangi terbentuknya Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Perkebunan Nusantara X (Persero) dapat diuraikan sebagai berikut:

- Pemerintah No. 162/1958 jo Peraturan Pemerintah No. 04/1959 Lembar Negara No. 07/1959, tentang Undang-undang nasionalisasi perusahaan-perusahaan milik Belanda yang berada didalam wilayah Republik Indonesia serta penentuan perusahaan pertanian/perkebunan tembakau milik Belanda yang dikenakan Nasionalisasi;
- Peraturan Pemerintah No. 173/1961 dan Peraturan Pemerintah No. 198/1961, tentang pembentukan Perusahaan Perkebunan Negara Kesatuan Jatim IX (Perusahaan Perkebunan Negara-Baru jatim IX);

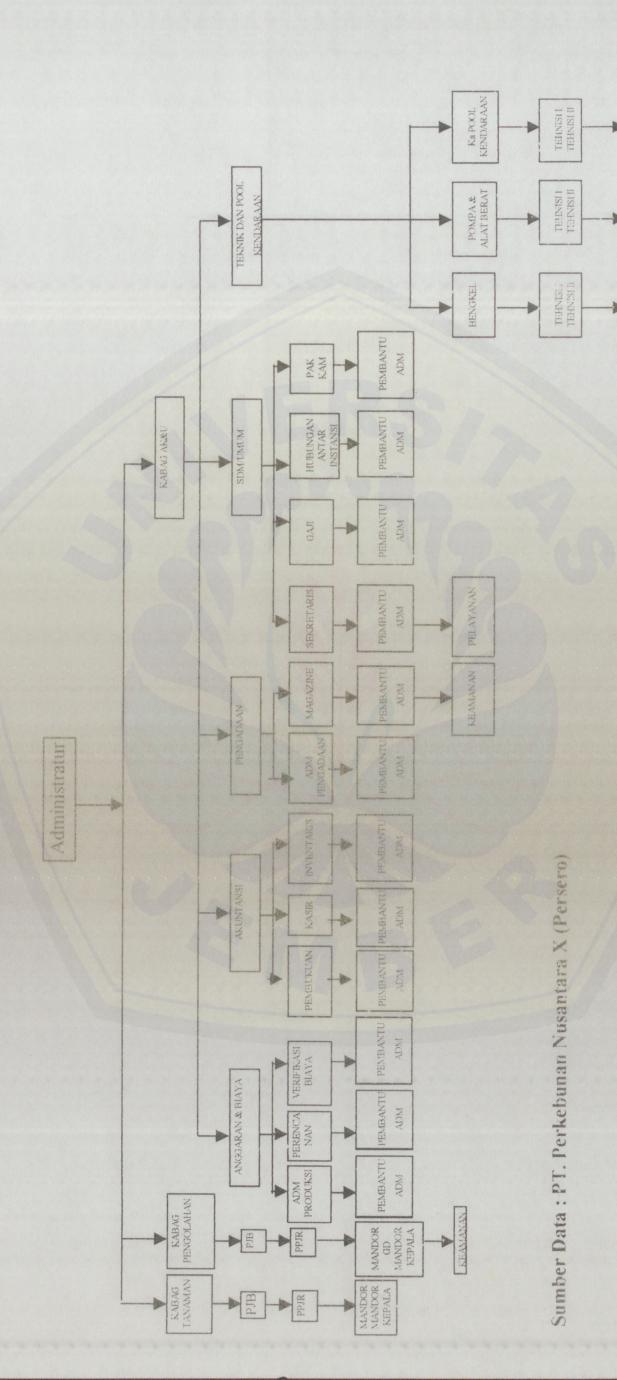
- 3) Peraturan Pemerintah No. 30/1963 tanggal 22 Mei 1953 Lembar Negara No. 51/1963, tentang Pembentukan Perusahaan Perkebunan Negara (PPN) Tembakau V dan VI (PPN-Baru V & VI);
- 4) Peraturan Pemerintah No. 14/1968 dan Lembar Negara No. 51/1968, tentang pendirian/pembentukan Perusahaan Negara Perkebunan (PNP) XXVII penggabungan dari PPTN V & VI;
- 5) Peraturan pemerintah No. 07/1972 tanggal 22 Februari 1972, tentang pengalihan bentuk PNP XXVII menjadi Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Perkebunan XXVII:
- Perkebunan Perusahaan Perseroan (persero) PT. Perkebunman XIX, Perusahaan Perseroan (Persero) XXI-XXII dan Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Perkebunan XXVII menjadi Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Perkebunan XXVII menjadi Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Perkebunan Nusantara X;
- 7) Akta No. 43 tanggal 11 Maret 1996 yang dibuat oleh dan dihadapan Harun Kamil, SH Notaris di Jakarta merupakan Akta Pendirian PT. Perkebunan Nusantara X (Persero).

#### 2.2 Struktur Organisasi.

Struktur organisasi adalah gambaran umum secara skematis tentang hubungan kerjasama dari orang-orang yang terdapat pada organisasi, dalam rangka mencapai suatu tujuan (struktur terlampir). Fungsi organisasi dalam suatu perusahaan meliputi penentuan kegiatan-kegiatan dan penentuan tanggung jawab serta pendelegasian wewenang untuk melaksanakan dan mempertanggung jawabkan kegiatan tersebut. Agar tugas operasional dapat berjalan dengan lancar maka perlu adanya struktur organisasi yang baik dan kerjasama antar karyawan dalam perusahaan sehingga tercipta keharmonisan. Secara skematis struktur organisasi tersebut sebagai berikut;

PEMBANTU TEHNISI

PENIBAN'TU TEHNISI



Gambar 1. Struktur Organisasi PT. Perkebunan Nusantara X (Persero)

#### 2.3 Uraian Tugas

Dari bagan struktur yang ada, masing-masing bagian/seksi mempunyai tugas tersendiri antara lain:

#### a. Administratur

- 1) Sebagai pimpinan tertinggi di PT. Perkebunan Nusantara X (Persero) Kebun Ajong Gayasan Jember yang bertanggung jawab penuh atas jalannya operasi kebun dan pabrik.
- 2) Untuk bidang tanah dan produksi (pabrik) bertugas merencanakan dan mengawasi pertanaman di semua kebun.
- 3) Melaporkan semua hasil produksi sesuai dengan Rancangan Anggaran Belanja Tahunan (RABT) dengan kualitas dan kuantitas yang baik.
- 4) Mengawasi dan bertanggung jawab atas Ready Stock barang di gudang.
- 5) Mengawasi jalannya operasi pabrik untuk mencegah terjadinya kemacetan.
- 6) Untuk bidang administrasi yaitu menyelenggarakan seluruh administrasi perkebunan.
- 7) Menyetujui pembuatan dan isi laporan keuangan serta laporan hasil dari Perkebunan.
- 8) Melaporkan keadaan umum Perkebunan.
- 9) Untuk bidang keuangan yaitu merencanakan kebutuhan modal kerja untuk setiap tahun.
- 10) Menyusun dan merencanakan RABT.
- b. Kepala Bagian Administrasi Keuangan dan Umum.
  - 1) Menyusun RABT untuk pabrik.
  - 2) Mengolah administrasi pajak.
  - 3) Membuat rencana kerja bulanan pabrik
  - 4) Menggunakan biaya tenaga kerja secara efektif dan efisien.
  - 5) Mengontrol tugas-tugas karyawan yang dibawahnya.
  - 6) Mengusulkan kepada administratur untuk menyempurnakan pekerjaan, mengangkat karyawan, kenaikan pangkat dan mutasi karyawan.

- c. Bagian Anggaran dan Pengendalian Biaya.
  - 1) Menyelenggarakan administrasi demi kelancaran perusahaan.
  - 2) Melayani dan mengerjakan semua administrasi perusahaan.
  - 3) Merangkum semua RABT yang diketahui administratur dan dikirim kekantor direksi Surabaya.
  - 4) Membuat dan merangkum permohonan modal kerja dan dikirim ke Direksi untuk memperoleh modal kerja.
  - 5) Membuat konsep laporan bulanan pimpinan.
  - 6) Membuat laporan bulanan dan tahunan hasi produksi.
  - 7) Membuat daftar inventaris perusahaan.
  - 8) Mengatur keluar masuknya barang di gudang.
  - 9) Mengatur keluar masuknya uang.
  - 10) Mengerjakan kupon-kupon bayaran karyawan.
  - 11) Menyusun dan membuat pertanggung jawaban keuangan untuk diserahkan kekantor Direksi di Surabaya.
- d. Bagian Akuntansi.
  - 1) Membuat rencana kerja dan anggaran perusahaan.
  - 2) Membuat pengajuan modal kerja.
  - 3) Mengkoordinasikan pelaksanaan bidang administrasi dan keuangan.
  - 4) Menangani masalah yang berhubungan dengan keluar masuknya keuangan perusahaan.
  - 5) Melaksanakan pembukuan.
  - 6) Membantu menghitung pembayaran gaji dan potongan gaji karyawan.
  - 7) Membantu menyusun laporan menejemen perusahaan.
  - 8) Membuat daftar piutang dan daftar potongan gaji karyawan.
- e. Bagian Sumber Daya Manusia.
  - 1) Membantu bagian anggaran dan pengendalian biaya untuk menyelesaikan tugas-tugas bidang umum dan personalia.
  - Menghitung biaya perjalanan dinas karyawan, baik didalam ataupun diluar kota/daerah.
  - 3) Mengawasi pekerjaan, pemeliharaan inventaris perusahaan.

- 4) Menggaji karyawan, karyawan bulanan dan karyawan harian tetap.
- f. Bagian Teknik.
  - 1) Merawat dan memperbaiki bangunan pabrik dan rumah karyawan.
  - 2) Merawat dan memperbaiki mesin-mesin kendaraan dan mesin-mesin pabrik.
  - 3) Mengajukan biaya perawatan kepada bagian akuntansi dan umum.
- g. Bagian Pengadaan.
  - 1) Membuat Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP).
  - 2) Mengawasi dan bertanggung jawab atas stock barang di gudang.
  - 3) Membuat dan mengajukan Daftar Permintaan Uang (DPU)
  - 4) Membuat permintaan barang lokal.
  - 5) Menghitung besarnya Pajak Penghasilan pasal 21, PPN Masukan, Pajak Penghasilan pasal 23, Pajak Penghasilan pasal 4 ayat (2).
  - 6) Melakukan pembayaran pajak dan pelaporan pajak ke Kantor Pelayanan Pajak.

#### 2.4 Tenaga Kerja.

Tenaga kerja PT. Perkebunan Nusantara X (persero) Kebun Ajong Gayasan Jember dapat di bedakan menjadi beberapa golongan I, II, III dan IV dengan keterangan sebagai berikut:

Tabel 1. Jenis Pegawai PT. Perkebunan Nusantara X (Persero) Kebun Ajong Gayasan Jember

No	Jenis Pegawai	Jumlah Pegawai
1.	Golongan III dan IV	34 orang
2.	Golongan I dan II	234 orang
3.	KKWT (Kontrak Kerja	131 orang
	Waktu Tertentu)	
	Jumlah	394 orang

Sumber Data: Bagian Sumber Daya Manusia PT. Perkebunan Nusantara X Kebun Ajong Gayasan Jember

#### 2.5 Jadwal kerja.

Untuk meningkatkan produktivitas dari perkebunanan penggunaan karyawan secara efektif dan efisiensi PT. Perkebunan Nusantara X (Persero) Kebun Ajong Gayasan Jember menerapkan jam kerja resmi yaitu delapan jam kerja sehari kecuali pada Hari Sabtu, tetapi dalam pelaksanaannya terkadang melebihi jam kerja resmi yang telah ditetapkan. Rincian jam kerja karyawan PT. Perkebunan Nusantara X (Persero) Kebun Ajong Gayasan Jember sebagai berikut:

Tabel 2. Jadwal Jam Kerja PT. Perkebunan Nusantara X (Persero) Kebun Ajong Gayasan Jember

Hari	Jam Kerja	
	Karyawan Tata Usaha	Karyawan Kebur
Senin- Jum'at	07.00-15.00 WIB	07.00-16.00 WIB
Sabtu	07.00-12.00 WIB	07.00-13.00 WIB
Istirahat	11.30-12.30 WIB	11.30-12.30 WIB
Minggu	Libur	Libur

Sumber Data: Bagian Sumber Daya Manusia PT. Perkebunan Nusantara X Kebun Ajong Gayasan

#### 2.6 Sistem Penggajian.

Gaji pokok merupakan imbalan dasar yang dibayarkan kepada karyawan menurut tingkat atau jenis pekerjaannya. Karyawan PT. Perkebunan Nusantara X (Persero) Kebun Ajong Gayasan Jember menerima besarnya gaji pokok ditetapkan berdasarkan Perjanjian Kerja Bersama (PKB). Sistem pembayaran gaji yang dilakukan oleh PT. Perkebunan Nusantara X (Persero) Kebun Ajong Gayasan Jember adalah sebagai berikut:

a. Gaji karyawan untuk golongan IA sampai dengan IID dibayarkan setiap bulannya pada tanggal 27 di kantor PT. Perkebunan Nusantara X (Persero) Kebun Ajung Gayasan Jember.

- b. Gaji untuk karyawan golongan IIA sampai dengan IVB terdapat perbedaan yaitu daftar gaji untuk golongan ini dibuat oleh Kantor Direksi Surabaya, sedangkan tanggal pembayaran tetap sama yaitu tanggal 27.
- c. Gaji untuk karyawan kontrak/karyawan Kerja Waktu Tertentu (KKWT) diberikan oleh pihak Direksi sesuai dengan Upah Minimum Regional (UMR) sebesar Rp 10.500,- perhari.

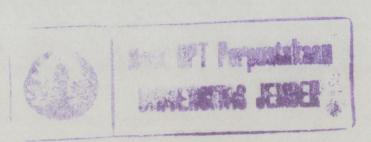
#### III. PELAKSANAAN PRAKTEK KERJA NYATA

#### 3.1 Deskripsi Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata.

Kegiatan Praktek Kerja Nyata merupakan salah satu syarat yang harus dilakukan mahasiswa Diploma III Perpajakan dalam penyusunan laporan Praktek Kerja Nyata (PKN) guna mendapatkan Gelar Ahli Madya (A.Md) di bidang Perpajakan. Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata dilaksanakan untuk menerapkan ilmu pengetahuan yang diperoleh mahasiswa selama kuliah dalam Praktek kerja dilingkungan perusahaan. Penulis melaksanakan kegiatan Praktek Kerja Nyata di PT. Perkebunan Nusantara X Kebun Ajong Gayasan Jember pada bagian pengadaan barang. Pelaksanaan ini dimulai tanggal 1 Maret 2004 sampai dengan tanggal 31 Maret 2004. Dalam pelaksanaan PKN penulis selain bertujuan untuk mempraktekkan ilmu yang telah didapat selama dalam bangku kuliah juga berkeinginan untuk mencari data mengenai kegiatan/aktivitas di perusahaan yang bersangkutan. Data yang diperlukan adalah data mengenai pelaksanaan pemungutan Pajak Penghasilan pasal 4 ayat (2). Penulis dalam menulis laporan ini memfokuskan pada data-data yang terdapat pada bulan Maret atau data terbaru yang penulis dapatkan saat melaksanakan Praktek Kerja Nyata.

Sebelum melaksanakan kegiatan Praktek Kerja Nyata mahasiswa diberi pengarahan terlebih dahulu oleh Ketua Program Studi Ilmu Administrasi mengenahi prosedur pelaksanaannya. Mahasiswa dapat melaksanakan Praktek Kerja Nyata apabila telah memenuhi persyaratan yaitu telah menyelesaikan 90 Sistem Kredit Semester dan pelaksanaan baru dapat dilakukan setelah Kartu Hasil Studi diterima serta Kartu Rencana Studi telah diprogramkan oleh mahasiswa. Tahapan-tahapan yang penulis lakukan sebelum akhirnya bisa melakukan kegiatan Praktek Kerja Nyata adalah sebagai berikut:

a. Mencari tempat/lokasi untuk melakukan Parl:tek Kerja Nyata. Tempat Praktek Kerja Nyata adalah Badan-badan usaha baik itu Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Swasta, maupun Badan Usaha Milik Daerah dengan berbagai bidang usaha dan telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak.



- b. Setelah ditentukan tempat untuk Praktek Kerja Nyata diperlukan surat pengantar (lihat lampiran 1) dari pihak Universitas Jember dalam hal ini adalah Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik sebagai sarana permohonan kesediaan perusahaan untuk dijadikan sebagai tempat pelaksanaan Praktek Kerja Nyata mahasiswa.
- c. Apabila obyek Praktek Kerja Nyata mengijinkan/bersedia atas surat pengantar dari Fakultas, mahasiswa yang bersangkutan diberi surat balasan (lihat lampiran 2) berupa kesediaan perusahaan untuk dijadikan sebagai tempat pelaksanaan Praktek Kerja Nyata, surat balasan tersebut dikirim ke fakultas oleh mahasiswa yang bersangkutan.
- d. Akhirnya pihak Fakultas menerima surat balasan dan memberikan surat tugas (lihat lampiran 3) kepada mahasiswa yang bersangkutan untuk melaksanakan Praktek Kerja Nyata. Surat tugas juga diberikan kepada Dosen Supervisi untuk mengantar mahasiswa ke tempat Praktek Kerja Nyata yang dituju.

## 3.1.1 Kegiatan Praktek Kerja Nyata di PT. Perkebunan Nusantara X (Persero)

Kegiatan Praktek Kerja Nyata yang dilakukan penulis tidak hanya bertujuan untuk mencari data-data guna penulisan laporan akhir Praktek Kerja Nyata saja tetapi juga bertujuan untuk mempraktekkan ilmu-ilmu perpajakan yang telah didapat selama masa perkuliahan. Oleh karena itu penulis ditempatkan di bagian Pengadaan Barang seksi Asuransi dan Perpajakan. Selain mempelajari tata cara perpajakan pada PT. Perkebunan Nusantara X (Persero), penulis juga lebih mengenal tentang lingkungan bekerja. Berikut ini adalah daftar kegiatan penulis dalam pelaksanaan Praktek Kerja Nyata yang dilaksanakan selama 30 hari yaitu mulai tanggal 01 Maret 2004 sampai dengan 31 Maret 2004.

Tabel 3. Daftar Kegiatan Praktek Kerja Nyata

Minggu	Kegiatan
1	2
Minggu I	Penempatan pada Bagian Pengadaan barang.
	2. Pengenalan dengan Kepala dan Staf Pengadaan
	Barang di PT. Perkebunan Nusantara x (Persero).
	3. Mempelajari pelaksanan perpajakan yang ada di
	PT. Perkebunan Nusantara X (Persero).
Minggu II	1. Menghitung jumlah penerimaan barang yang
	masuk.
	2. Menyusun arsip PPh dan PPN tahun 2003.
	3. Menyusun formulir 17721-A1 atas SPT-Tahunar
	pasal 21 pegawai tetap tahun 2003.
	4. Menemani Dosen Supervisi bertemu dengar
	Kepala Staf Bagian Sumber Daya Manusia dar
	Kepala Staf Bagian Pengadaan.
	5. Memasukkan OBL (Order Beli Langsung).
Minggu III	1. Kekantor KPP untuk melaporkan SPT-Tahunai
	Badan dan Orang Pribadi tahun 2003.
	2. Kekantor SDM untuk menanyakan struktu
	organisasi.
	3. Membuat laporan mingguan dan bulanan untuk
	pengadaan barang.
	4. Wawancara dengan staf pengadaan barang bagian
	Perpajakan tentang pelaksanaan PPh pasal 4 aya
	(2).
	5. Wawancara dengan staf bagian SDM mengena
	prosedur sewa tanah dan mencari data yang
	berkaitan dengan sewa tanah

1	2
	6. Mencari data Daftar Permintaan Uang (DPU) untuk pembayaran pajak dan sewa tanah.
	7. Melaporkan SPT masa PPh pasal 4 ayat (2) bulan Maret 2004 kekantor KPP.
	8. Survey lapangan bersama Kepala Bagian
	Pengadaan Barang ke gudang tembakau TBN-II dan TBN III
Minggu IV	1. Mencatat penghitungan pembelian barang kedalam
	himpunan pengadaan material.
	2. Mencatat OBL dengan menggunakan komputer.
	3. Survey lapangan bersama Kepala Bagian
	Pengadaan Barang ke gudang tembakau TBN-V dan TBN-VI.
	4. Wawancara dengan staf bagian AK&U mengenai pembayaran sewa tanah kepada petani.
	5. Mencatat dan menghitung jumlah penerimaan barang
Minggu V	mengumpulkan data-data yang diperlukan sebagai bahan penyusunan laporan PKN.
	2. Mencatat dan menghitung jumlah penerimaan barang.
	3. Meminta surat keterangan selesai magang pada
	bagian SDM.
	4. Perpisahan

Sumber Data: Kegiatan Lapangan

#### 3.2 Hasil Praktek Kerja Nyata

#### 3.2.1 Dasar Hukum Pengenaan PPh pasal 4 ayat 2

Dasar hukum pajak penghasilan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dari persewaan tanah dan atau bangunan didasarkan pada:

- a. PP RI No 29 tahun 1996 tanggal 18 April 1996, tentang pembayaran Pajak Penghasilan atas penghasilan dari persewaan tanah dan atau bangunan.
- b. KMK No 394/KMK.04/1996 tanggal 5 Juni 1996, tentang pengenaan Pajak Penghasilan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dari persewaan tanah dan atau bangunan.
- c. PP RI No 5/2002 tanggal 23 Maret 2002, tentang perubahan atas PP RI No.
   29/1996. tentang pembayara Pajak Penghasilan atas sewa tanah dan atau bangunan.
- d. KMK No 120/KMK.03/2002, tentang perubahan KMK No 394/KMK.04/1996, tentang pelaksanaan pembayaran dan pemotongan Pajak Penghasilan atas penghasilan dari persewaan tanah dan atau bangunan.
- e. Keputusan Dirjen Pajak No KEP-227/PJ/2002 tanggal 23 April 2002, tentang tata cara pemotongan dan pembayaran serta pelaporan Pajak Penghasilan dari persewaan tanah dan atau bangunan.

#### 3.2.2 Tata Cara Pemotongan

Berdasarkan pasal 5 Keputusan Direktorat Jendral Pajak No KEP- 227/PJ/2002, tentang tata cara pemotongan PPh pasal 4 ayat (2) atas sewa tanah dan atau bangunan adalah sebagai berikut:

- a. Memotong Pajak Penghasilan yang terutang pada saat pembayaran atau terutangnya sewa tanah dan atau bangunan, tergantung peristiwa mana yang lebih dahulu terjadi.
- b. Menyetor Pajak Penghasilan yang terutang ke Bank Persepsi atau Kantor Pos dan Giro paling lambat tanggal 15 bulan takwim berikutnya setelah bulan pembayaran atau terutangnya sewa, apabila tanggal 15 jatuh pada hari libur maka penyetoran dilakukan pada hari kerja sebelumnya.

c. Melaporkan pemotongan dan penyetoran Pajak Penghasilan terutang ke Kantor Pelayanan Pajak paling lambat tanggal 20 bulan takwim berikutnya setelah bulan pembayaran atau terutangnya sewa, apabila tanggal 20 jatuh pada hari libur maka pelaporan dilakukan pada hari kerja sebelumnya.

#### 3.2.3 Tata Cara Pelunasan

Keputusan Dirjen Pajak No Kep-227/PJ/2002 tahun 2002 pasai 4, tentang tata cara pelunasan Pajak Penghasilan atas sewa tanah dan atau bangunan dilakukan melalui:

- a. Pemotongan oleh penyewa dalam hal penyewa adalah badan pemerintah subjek pajak badan dalam negeri, penyelenggara kegiatan, Bentuk Usaha Tetap (BUT), kerjasama operasi, perwakilan perusahaan dalam negeri lainnya dan orang pribadi yang ditetapkan oleh Dirjen Pajak.
- b. Penyetoran sendiri oleh yang menyewakan dalam hal penyewa adalah orang pribadi atau bukan subjek pajak.

#### 3.3 Sistem Perpajakan di PT.Perkebunan Nusantara X.

Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan Undang-Undang (dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditujukan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum (Soemitro dalam Mardiasmo, 2001,1). Pajak mempunyai peranan yang penting dalam pembangunan nasional, karena pajak merupakan sumber penerimaan terbesar bagi negara. Apabila pendapatan negara dari sektor pajak meningkat maka pembangunan nasional dapat tercapai. PT. Perkebunan Nusantara X (Persero) merupakan Badan Usaha Milik Negara yang bergerak dalam bidang Perkebunan tembakau dan telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) dengan nomor NPWP 1.061.130.9.626.004 mempunyai kewajiban untuk membayar pajak yang terutang kepada negara. Sesuai dengan sistem pemungutan pajak di Indonesia yaitu Self Assessment System maka PT. Perkebunan Nusantara X diberi wewenang untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang, sehingga pihak perusahaan berperan aktif dalam perhitungan

pajaknya. Mulai dari menghitung, menyetor dan melaporkan sendiri pajak yang terutang, sedangkan fiskus tidak boleh ikut campur hanya bisa mengawasi. Pajak yang harus dibayar oleh PT. Perkebunan Nusantara X antara lain Pajak Penghasilan pasal 21 atas pegawai tetap, Pajak Penghasilan pasal 23 atas sewa komputer, Pajak Penghasilan pasal 4 ayat (2) atas sewa tanah, jasa kontruksi pemasangan instalasi penangkal petir, Pajak Pertambahan Nilai masukan atas pengadaan barang dan jasa.

# 3.3.1 Pelaksanaan PPh Pasal 4 ayat (2) di PT.Perkebunan Nusantara X (Persero)

Perusahaan ini adalah Badan Usaha Milik Negara yang bergerak dibidang pengolahan tembakau. Sebelum melakukan proses pengolahan tembakau terlebih dahulu dilakukan proses penanaman. Proses ini menyebabkan pihak PT. Perkebunan Nusantara X (Persero) melakukan penyewaan tanah kepada petani untuk pembibitan dan pembudidayaan tembakau tersebut. Undang-undang Perpajakan No 17 Tahun 2000 menyebutkan bahwa penghasilan yang diperoleh dari persewaan tanah dan atau bangunan dikenakan pajak yaitu Pajak Penghasilan pasal 4 ayat (2) dengan tarip 10%. PT. Perkebunan Nusantara X (Persero), selaku Pengusah Kena Pajak wajib melakukan pemotongan, penyetoran dan pelaporan PPh pasal 4 ayat (2).

#### 3.3.2 Pelaksanaan Sewa Tanah di PT. Perkebunan Nusantara X (Persero)

Proses pelaksanaan sewa tanah pada PT. Perkebunan Nusantara X (Persero) Kebun Ajong Gayasan Jember memiliki beberapa tahap yang harus dilalui:

- a. Observasi lahan yang dilakukan oleh Litbang yaitu mengukur tingkat kesuburan dan kelayakan tanah.
- b. Jika telah didapatkan hasil dari penelitian Litbang maka dilakukan pengukuran tanah (lihat lampiran 7) dan dilanjutkan dengan pertemuan tokoh-tokoh atau perwakilan dari kelompok-kelompok petani. Pertemuan ini dilakukan untuk mencari kesepakatan harga antara petani sebagai pihak yang menyewakan dengan PT. Perkebunan Nusantara X (Persero) sebagai pihak penyewa.

c. Setelah didapatkan kesepakatan harga tahap berikutnya adalah penandatanganan surat bukti pembayaran lahan (lihat lampiran 8) dan surat penyerahan (lihat lampiran 9) lahan oleh perwakilan dari kelompok dan diikuti pembayaran sewa kepada pihak yang menyewakan yaitu petani.

Harga sewa yang disepakati petani dan pihak PT. Perkebunan Nusantara X (Persero) masih termasuk pajak yaitu Pajak Penghasilan pasal 4 ayat (2) maka dari itu harus dilakukan pemotongan oleh PT. Perkebunan Nusantara X (Persero), selaku Pengusaha Kena Pajak. Selain itu PT. Perkebunan Nusantara X (Persero) juga berkewajiban untuk menyetorkan pajak yang telah dipotong ke Bank Persepsi atau Kantor Pos Dan Giro serta melaporkan hasil pemotongan ke KPP dan membuat laporan SPT Tahunan wajib pajak badan.

#### 3.3.3 Contoh Penghitungan PPh pasal 4 ayat (2)

Perhitungan PPh pasal 4 ayat (2) atas sewa tanah, tarif yang digunakan adalah 10% x jumlah bruto. Contoh perhitungan sebagai berikut :

PT. Perkebunan Nusantara X (Persero) Kebun Ajong Gayasan Jember menyewa tanah pada kelompok tani bagian TBN-1 dengan nilai objek pajaknya Rp. 180.050.538,- dengan bukti potong tanggal 25 Febuari 2004. PPh pasal 4 ayat (2) yang harus dipotong adalah

10 % x Jumlah bruto

= 10 % x Rp 180.505.380,-

= Rp 18.050.538,-

#### 3.3.4 Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 4 Ayat (2)

Surat perjanjian yang telah dibuat dan disepakati bersama antara pihak PT. Perkebunan Nusantara X (Persero) dengan pihak petani menandakan bahwa PT. Perkebunan Nusantara X (Persero) sebagai PKP berhak melakukan pemotongan PPh pasal 4 ayat (2) atas sewa tanah. Pemotongan tersebut dilakukan oleh karyawan bagian akuntansi yang mana pemotongannya telah disesuaikan dengan UU No 10 tahun 1994 sebagaimana terakhir diubah dengan UU No 17 tahun 2000.

Pada saat melakukan pemotongan PPh pasal 4 ayat (2) atas sewa tanah PT. Perkebunan Nusantara X (Persero), selaku pemotong pajak, wajib membuat bukti potong rangkap tiga (lihat lampiran 14) yaitu:

- a. Lembar 1: Untuk wajib pajak yaitu Pihak petani.Lembar ini digunakan sebagai bukti bahwa pihak petani telah dipotong PPh pasal 4 ayat (2)
- b. Lembar 2: Untuk Kantor Pelayanan Pajak.Lembar ini merupakan lampiran yang nantinya dalam SPT masa PPh pasal 4 ayat (2)
- c. Lembar 3: Untuk Pemotong pajak yaitu PT. Perkebunan Nusantara X (Persero), selaku pemotong pajak

#### 3.3.5 Penyetoran Pajak Penghasilan Pasal 4 Ayat (2) di Bank Persepsi

Penyetoran PPh pasal 4 ayat (2) atas sewa tanah di PT. Perkebunan Nusantara X Kebun Ajong Gayasan Jember dilakukan oleh staf Pengadaan Barang bagian Asuransi dan Perpajakan. Sebelum melakukan pembayaran staf Pengadaan Bagian Asuransi dan Perpajakan membuat Daftar Permintaan Uang (lihat lampiran 10) untuk meminta sejumlah uang seperti yang tertera didalam Surat Setoran Pajak yang telah disetujui oleh Administratur PT. Perkebunan Nusantara X (persero), setelah semua terselesaikan maka staf Pengadaan bagian Asuransi dan Perpajakan membayar/menyetor ke KPKN via Bank Persepsi (Bank Mandiri) dengan membawa SSP rangkap lima (lihat lampiran 28) yaitu:

- a. Lembar 1: Untuk Arsip wajib pajak.
- b. Lembar 2: Untuk KPP melalui KPKN.
- c. Lembar 3: Untuk dilaporkan wajib pajak ke KPP.
- d. Lembar 4: Untuk Bank Persepsi/Kantor Pos dan Giro.
- e. Lembar 5 : Untuk arsip wajib pungut/pihak lain.
  Berikut ini adalah contoh pengisian lembar SSP untuk PT. Perkebunan Nusantara X (Persero) Kebun Ajong Gayasan Jember.
- 1) Nomor Pengukuhan Wajib Pajak : 01 061 130 9 626 004
- 2) Nama Wajib Pajak : PT. Perkebunan Nusantara X (Persero)

3) Alamat Wajib Pajak : Jl. M. H. Thamrin No 143 Jember

4) Kode Jenis Pajak : 0114
5) Kode Jenis Setoran : 100

Pembayaran/penyetoran PPh pasal 4 ayat (2) dilakukan paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya setelah bulan saat terutangnya pajak. Jika penyetoran jatuh tempo pada hari libur maka penyetoran dilakukan pada hari kerja berikutnya, setiap keterlambatan didalam pembayaran/penyetoran akan dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% perbulan yang dihitung sejak saat jatuh tempo.

#### 3.3.6 Pelaporan pada Kantor Pelayanan Pajak

Tahap berikutnya setelah melakukan penyetoran via Bank Mandiri adalah melaporkan PPh pasal 4 ayat (2) ke KPP dengan cara mengisi secara benar, lengkap dan jelas SPT masa rangkap dua (lihat lampiran 13) yaitu lembar pertama untuk KPP dan lembar kedua untuk pemotong pajak. Pelaporan ke KPP, SPT Masa ini dilampiri dengan:

- a. Daftar bukti pemotongan (lihat lampiran 12)
- b. Bukti pemotongan lembar kedua (lihat lampiran 14)
- c. SSP lembar ketiga (lihat lampiran 28)

Lampiran tersebut diatas apabila dinyatakan lengkap, maka pihak KPP Jember akan memberikan Bukti Penerimaan Surat (lihat lampiran 11). Kegiatan pelaporan PPh pasal 4 ayat (2) di PT. Perkebunan Nusantara X (Persero) yang dilakukan oleh staf Pangadaan bagian Asuransi dan Perpajakan dilaporkan ke KPP Jember selambat-lambatnya tanggal 20 bulan takwim berikutnya setelah masa pajak berakhir. Jatuh temo pelaporan apabila bertepatan dengan hari libur maka pelaporan dilakukan sebelum tanggal jatuh tempo. Setiap keterlambatan dalam melaporkan SPT Masa ke KPP akan dikenakan denda Rp 50.000,-.

#### 3.4 Penilaian terhadap PT. Perkebunan Nusantara X (Persero) Kebun Ajong Gayasan Jember

Berdasarkan kegiatan Praktek Kerja Nyata (PKN) yang dilaksanakan oleh penulis selama satu bulan di PT. Perkebunan Nusantara X (Persero) Kebun Ajong Gayasan Jember yang bergerak dibidang pengolahan tembakau. Sebagai Pengusaha Kena Pajak dengan NPWP 01-061-130-9-626-004, maka PT. Perkebunan Nusantara X (Persero) berkewajiban melakukan pemotongan pajak khususnya Pajak Penghasilan pasal 4 ayat (2) atas sewa tanah

Pelakasanaan kewajiban perpajakannya PT. Perkebunan Nusantara X (Persero) Kebun Ajong Gayasan Jember diberi wewenang untuk menghitung, menyetor dan melaporkan sendiri jumlah pajak yang dipotong ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Jember. Penghitungan pajak terutang dilakukan bersamaan dengan saat pembayaran sewa tanah kepada petani. Pembayaran/penyetoran dan pelaporan PPh pasal 4 ayat (2) yang dipotong/dipungut dari kelompok petani dengan menggunakan SSP melalui Bank Mandiri cabang Jember. Pembayaran/penyetoran tersebut dilaksanakan selambatlambatnya tanggal 15 bulan takwim berikutnya setelah masa pajak berakhir. Kewajiban melaporkan perhitungan Pajak Penghasilan pasal 4 ayat (2) dilaksanakan dengan menggunakan SPT Masa PPh pasal 4 ayat (2) selambatlambatnya tanggal 20 bulan takwim berikutnya setelah masa pajak berakhir. Pembayaran/penyetoran serta pelaporan PPh pasal 4 ayat (2) di PT. Perkebunan Nusantara X (Persero) Kebun Ajong Gayasan Jember selalu tepat waktu dan tidak pernah terlambat. Penyetoran dan pelaporan tersebut selalu dilaksanakan antara tanggal 01 s/d 05, sehingga tidak pernah dikenakan sanksi administrasi berupa denda bunga sebesar 2 % maupun denda sebesar Rp.50.000,-

Selaku Pengusaha Kena Pajak (PKP) PT. Perkebunan Nusantara X (Persero) Kebun Ajong Gayasan Jember selaku telah melaksanakan kewajiban perpajakannya yang meliputi penghitungan, pemotongan, penyetoran, pelaporan secara rutin sesuai Undang-Undang Perpajakan yang berlaku. Diharapkan di masa yang akan datang PT. Perkebunan Nusantara X (Persero) kebun Ajong Gayasan

Jember dapat tetap mempertahankan kinerja dari pembayaran Pajak Penghasilan pasal 4 ayat (2) tersebut.

Tabel 4. Daftar Kepatuhan Pembayaran dan Pelaporan PPh Pasal 4 Ayat 2

Masa Pajak	Tanggal Pembayaran	Tanggal Pelaporan
Januari 2004	03 Februari 2004	11 Februari 2004
Februari 2004	26 Februari 2004	04 Maret 2004
Maret 2004	01 April 2004	02 April 20004
April 2004	29 April 2004	05 Mei 2004

Sumber Data: PT. Perkebunan Nusantara X (Persero) Kebun Ajong Gayasan Jember

#### Keterangan:

- a. Masa Januari s/d Maret terdapat 14 kelompok petani dan bulan April terdapat 4 kelompok Petani yang menyewakan tanahnya kepada PT. Perkebunan Nusantara X (Persero)
- b. Penghitungan dilaksanakan bersamaan dengan pembayaran sewa kepada petani yaitu pada bulan sewa lahan tersebut diserahkan.

#### Digital Repository Universitas Jember

#### IV. PENUTUP

#### 4.1. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dan keterangan diatas serta pengamatan yang dilakukan penulis selama melaksanakan Praktek Kerja Nyata (PKN) dapat ditarik kesimpulan:

- a. Kewajiban perpajakan yang dilakukan oleh PT. Perkebunan Nusantara X (Persero) Kebun Ajong Gayasan Jember khususnya Pajak Penghasilan pasal 4 ayat (2) atas sewa tanah dan atau bangunan sudah berjalan dengan baik dan tertib sesuai dengan Undang-Undang No 17 tahun 2000 dan sesuai dengan Keputusan Direktorat Jendral Pajak No KEP-227/PJ/2002, tanggal 23 April 2002. Tentang Pajak Penghasilan pasal 4 ayat 2.
- b. Sistem perpajakan yang digunakan oleh PT. Perkebunan Nusantara X (Persero) Kebun Ajong Gayasan Jember adalah Self Assesment System yaitu menghitung, menyetor dan melaporkan sendiri pajaknya yang terutang.
- c. Pembayaran/penyetoran dan pelaporan yang dilakukan oleh PT. Perkebunan Nusantara X (Persero) Kebun Ajong Gayasan Jember, selalu tepat waktu sehingga tidak pernah terkena sanksi administrasi.

#### 4.2. Saran

Peraturan perpajakan sering mengalami perubahan dan perkembangan sesuai dengan keadaan jaman yang terus berkembang. Perubahan ini diharapkan mampu menjawab perkembangan jaman tersebut sehingga peraturan tersebut dapat memberikan rasa keadilan dan kepastian hukum bagi wajib pajak, maka perlu adanya PT. Perkebunan Nusantara X (Persero) kebun Ajong Gayasan Jember sebagai Badan Usaha Milik Negara yang berskala besar untuk mengikuti perkembangan tersebut dengan cara pelatihan/penyuluhan tentang perpajakan yang diadakan oleh Kantor Pelayanan Pajak (KPP) agar prestasi yang sudah dicapai dapat dipertahankan. Menggali informasi mengenai perpajakan melalui "Berita Pajak" yang diterbitkan

oleh Dirjen Pajak, buku-buku Perpajakan ataupun referensi-referensi lain yang berkaitan dengan perkembangan sistem perpajakan

Terselesaikannya laporan tugas akhir Praktek Kerja Nyata ini, penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak khususnya PT. Perkebunan Nusantara X (Persero) Kebun Ajong Gayasan Jember di bagian Pengadaan Barang yang telah memberikan bantuan dan bimbingan dalam menyelesaikan laporan ini. Semoga laporan ini dapat memberikan manfaat bagi penulis sendiri maupun para pembaca.

#### Digital Repository Universitas Jember

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Republik Indonesia. Undang-Undang No. 16 Tahun 2000. Ketentuan Umum Perpajakan. Jakarta.
- ------. Undang-Undang No. 17 Tahun 2000. Pajak Penghasilan. Jakarta.
- Menteri Keuangan. KMK No. 120/KMK.04/2002. Pelaksanaan Pembayaran Dan Pemotongan Pajak Penghasilan dari Persewaan Tanah Dan Atau bangunan. Jakarta.
- Direktorat Jenderal Pajak. KEP-227/PJ/2002. Tata Cara Pemotongan Dan Pembayaran Serta Pelaporan Pajak Penghasilan Atas Sewa Tanah Dan Atau Bangunan. Jakarta.

Mardiasmo. 2004. Perpajakan Edisi Revisi. Yogyakarta: Andi Offset

Badan Penerbitan Universitas Jember. 1998. Pedoman Penulisan Karya Ilmiah. Jember



#### DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL UNIVERSITAS JEMBER

## FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Jl. Kalimantan - Kampus Tegalboto, Telp. (0331) 335586-331342, fax. (0331) 335586 Jember 68121

Email: Fisipunej @ jember, wasantara.net.id Telp. (0331) 332736

Nomor Lampiran

Perihal

: 0484 /J25.1.2/PP.9/2004

: Permohonan Tempat Magang

Jember, 5 Pebruari 2004 1C- RUPAZ /04.016

Kepada Yth

: Pimpinan PT. Perkebunan Nusantara X

Jl. Ajung Jember

di Jember

Dengan hormat,

Dalam rangka mengembangkan wawasan praktis mahasiswa Program Studi D-III Perpajakan Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember, maka setiap mahasiswa yang telah menyelesaikan minimal 90 SKS diwajibkan untuk mengikuti kegiatan magang.

Sehubungan dengan hal tersebut kami mengharap kesediaan Bapak memberikan kesempatan kegiatan magang mahasiswa pada PT. Perkebunan Nusantara X Ajung

Adapun nama mahasiswa yang akan mengikuti kegiatan magang tersebut sebagai

		21126
No	Nama	NIM
1	Nani Rosita	01 - 1063
2.	Hari Santoso	01-1121

Demikian permohonan kami atas bantuan dan kerjasama yang baik kami ucapkan

a.n. Dekan Pembantu Dekan I,

Drs. Agus Budihardjo, MA NIP. 130 879 634

Tembusan kepada Yth:

1. Ketua Program Studi D-III Perpajakan FISIP. UNEJ

2. Kasubag. Pendidikan FISIP. UNEJ.

Srimugung doc3/02

#### Digital Repository Universitas Jember

Lampiran 2

Nomor

: IC-RUPA2/04.016

Lampiran Hal

: Permohonan Tempat Magang

Ajong, 16 Pebruari 2004

Kepada Yth,
Universitas Jember
Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik
Jalan Kallmantan Tegalboto
JEMBER

Menunjuk surat Saudara No. 0484/J25.1.2/PP.9/2004 hal pada pokok, dengan ini diberitahukan bahwa kami dapat menyetujui/memberikan ijin kepada Mahasiswa saudara untuk melaksanakan Praktek Keja di PT. Perkebunan Nusantara X (Persero) kebun Ajong Gayasan pada tanggal 1 Maret 2004 s/d 31 Maret 2004 kepada sbb:

NO.

NAMA

NIM

JURUSAN

2.

NANI ROSITA HARI SANTOSO

01-1063

PERPAJAKAN PERPAJAKAN

Demikian, untuk menjadikan maklum.

PT. PERKEBUNAN NUSANTARA X (PERSERO)

KEBUN AJONG GAYASAN

Administratur

Administratur

Ir. S U G I A N T O NIK. 106 2038 70 80 15

Kindasan:

O SDM, Umum Ajong

o Arsip

CMjin Praktek/HD.S/67



# DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL UNIVERSITAS JEMBER

## FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Jl. Kalimantan - Kampus Tegalboto, Telp. (0331) 335586-331342, fax. (0331) 335586 Jember 68 *Email: Fisipunej @ jember, wasantara.net.id Telp. (0331) 332736* 

SURAT - TUGAS No.: 07/2/J.25.1.2/PP.9/2004

Dekan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Jember Menugaskan kepada mahasiswa yang namanya tercantum dibawah ini :

No	Nama	NIM
1.	Nani Rosita	01 – 1063
2	Hari Santoso	01-1121

Untuk mengikuti program kegiatan magang pada PT. Perkebunan Nusantara X Ajung di Jember, selama 30 hari terhitung mulai tanggal 01 Maret 2004 s/d 31 Maret 2004. Mahasiswa diwajibkan mengikuti kegiatan magang berdasarkan tata tertib dan disiplin kerja yang berlaku. Demikian surat tugas ini dibuat untuk dilaksanakan dengan sebaik – baiknya.



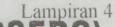
#### Tembusan kepada Yth.

- 1. Ketua Program Studi D-III Perpajakan FISIP UNEJ.
- 2. Kasubag. Pendidikan FISIP UNEJ

3. Kasubag, Keuangan FISIP UNEJ.

Umumimsword sri magang 1 doc

Digital Repository Universitas Jember



### PT. PERKEBUNAN NUSANTARA X (PERSERO)



KEBUN AJONG - GAYASAN

JL. MH Thamrin 143 Jember 68171 Desa Ajong Kec. Ajong Kab. Jember

Fac. : (0331) 335145

Phone: (0331) 321501, 331058

Banker:

PT. BANK MANDIRI (PERSERO) JEMBER

#### SURAT KETERANGAN

Nomor: 003/SUKET/III/KOL/2004

Sesuai dengan surat PT. Perkebunan Nusantara X (persero) kebun Ajong Gayasan Nomor: IC-RUPA2/04:016 tanggal 16 Pebruari 2004 dengan ini menerangkan bahwa:

Nama

: NANI ROSITA

NIM

: 01 - 1063

Mahasiswa

: UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Jurusan

ILMU ADMINISTRASI

Program Studi :

D-III PERPAJAKAN

Telah melaksanakan kegiatan Magang Kerja di PT. Perkebunan Nusantara X (Persero) Kebun Ajong Gayasan mulai tanggal 01 Maret 2004 sampai dengan 31 Maret 2004.

Demikian surat keterangan ini dibuat dan untuk dapatnya dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ajong Gayasar

ERSERO

Ajong, 31 Maret 2004

PT PERKEBUNAN NUSANTARA X (PERSERO) SUNAN NEKEBUN AJONG GAYASAN KEBUN

Administratur,

II. SUGIANTO NIK. 1062038706015

Ch.hd.s/SUKET



### PT. PERKEBUNAN NUSANTARA X (PERSERO)

KEBUN AJONG - GAYASAN

JL. MH Thamrin 143 Jember 68171 Desa Ajong Kec. Ajong Kab. Jember

Fac. : (0331) 335145 Phone : (0331) 321501, 331058

Banker :

PT. BANK MANDIRI (PERSERO) JEMBER

#### Daftar hadir Kegiatan Praktek Kerja Nyata

Nama: Nani Rosita NIM: 010901101063

NO	HARI/TANGGAL	TANDA TANGAN
1.	Senin,01 Maret 2004	1. 26
2.	Selasa,02 Maret 2004	0 / 2. 1
3.	Rabu,03 Maret 2004	3. 14 (4)
4.	Kamis,04 Maret 2004	1 1 4. 10/2
5.	Jum'at,05 Maret 2004	5.
6.	Sabtu,06 Maret 2004	6.
7.	Senin,08 Maret 2004	7. 2/- 0,
8.	Selasa, 39 Maret 2004	(), 8. //2
9.	Rabu,10 Maret 2004	9. W1= (tale
10.	Kamis,11 Maret 2004	10. 1
11.	Jum'at,12 Marct 2004	11. (2/2
12.	Sabtu,13 Maret 2004	12.
13.	Senin,15 Maret 2004	13.(~)
14.	Selasa,16 Maret 2004	14. 201
15.	Rabu,17 Maret 2004	15.6/1-
16.	Kamis, 18 Maret 2004	16. XF
17.	Jum'at,19 Maret 2004	17. (0)
18.	Sabtu,20 Maret 2004	18. W/c
19.	Senin,22 Maret 2004	19. Wer - 1)
20.	Selasa,23 Maret 2004	- 1 20. W/-
21.	Ratu,24 Maret 2004	21. / ( /- /
22.	Kamis,25 l/laret 2004	Q, 22. VVF
23.	Jum'at,26 Maret 2004	23.6%
24.	Sabtu,27 Maret 2004	1 1 24. Vh
25.	Senin,29 Maret 2004	25. 1/2
26.	Sclasa,30 Maret 2004	1 26. Wh
27.	Rabu,31 Maret 2004	27.

Seksi Asuransi & Pajak

Bpk.Samsul Hadi

Mengetahui

Kepala Pengadaan Barang

Bnk.Subur



# DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL UNIVERSITAS JEMBER FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK JURUSAN ILMU ADMINISTRASI PROGRAM STUDI D-III PERPAJAKAN

#### DAFTAR KEGIATAN KONSULTASI / BIMBINGATI LAPORAN AKHIR

Nama

Nani Rosita

Nomor Induk Mahasiswa

:010903101063

Alamat

:Jl.Bangka VIII No 4

Jurusan

: Ilmu Administresi

Program Studi

D-Mi Popalakan

Judul Laporan

Tata cara Pemotongar, Penyetonar, Dear Pelemonner Pph Pasal 4 ayat 2 atas sewa

tanah dan bangunan di PT.Perkebunan

Musantara (PERSERO) Ajoeng - Jember

Gosen Pembimbing

dri Agio Mattherjo, 191

No.	Hari/Tgl	Jam	Uraian Kegiatan	TID Pepabimbing
	Babba, 3 west of	77.00	Bimbirg on Bab I,II,III,IV	AL
MANY WER TO LIKE IT THE WAY	Semin,25 April 04	07:00	Bimbingan Bab I.II, III, IV	10/
Charles of Contracts of Contracts and	Junat, 7 Nei 94	07.30	Bimbingun Bab I, III, III, IV	118
4.	Jumat, 13 Mei 04	08.00	Bimbingen Bab I, II, III, IV.	11/1
5.	Rabu, 19 Mei 04	07.00	Bimbingon Bab I, II, III,	v lk
6.	Benin 31Mei 04	08.00	Bimbingan Bab I, II, III,	- The state of the
1.	Sabtu, 5 Juni 04	0.07	Bimbings Bob I.II.III.I	1/3
8.	Rabu,9 juni 04	07.00	Bimbingan Bat F, II, III,	TV II
9.1	Kamis, 10 juni04	07.00	Bimbingan BabI, II, III,	IV OT
10.	jum, at ,11 juni 0/	07.00	ACC laporan	16,5
11.				177
12.				
13.				
14.			39	
15.				

Catatan: 1. Harap dibawa pada setiap konsultasi untuk ditandangani oleh Dosen Pembimbing

2. Diserahkan ke bagian akademik suat akan ajian Laporan Akhir.

Lampiran 7

#### GAMBAR PENGUKURAN LAHAN PROGRAM TBN/NO

MTT. 2004. 1. 2001. KEBUN AJONG GAYASAN LOKASITBNINO ...

Bagian Nama Pemilik Tanah Kelas Tanah Nomor Persil Juniah Lokean Luas menurut pipil Luas Menurut ukur Bentuk kerja sama (coret yang tidak perlu)

1. Sewa tanah untuk pembibitan/tanaman

2. ITBNO

Uang Col per Ha. Jumlah Fembayaran

Penalaran: FOIS, Kilon, A

- Identitas tanah : belong/padas/daerah Phytium Tanah Sawah / tegat

(coret yang tidak perlu)

- Tingkat kesuburan tanah: (CUBUR)

- Pengairan: (SAI) (MCDAH)

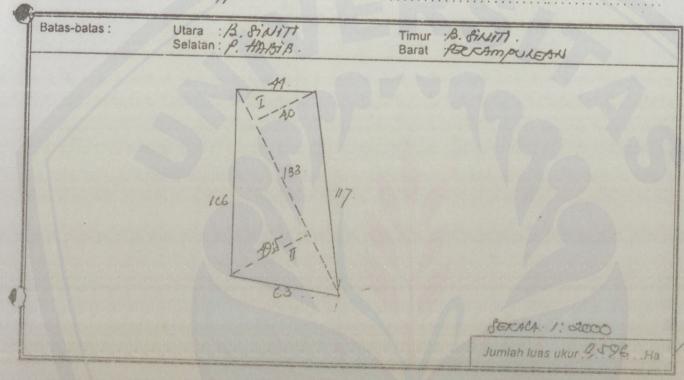
- Perkiraan tanggal tanam: (18- PCT) (03

- Perkiraan tanggal panen : 20 MARET CA...

- Di-Huar/ di dalam areal yang direncanakan (coret yang tidak perlu)

- Kalau di luar berapa Km dari areal yang direncanakan:.....

- Terletak di Desa / Kelurahan : ATCN6



Luas Segitiga I 133 , 10 x 95 + 0 x 66 P. HABIB Pemilik tanah Mengetahui Form: AJG-FORM-TAN-01-03 Penka TBN/NO-PJB TBN/NO

Lampiran 8

	(PERSERO)  KEBUN AJONG GAYASAN	RO) GAYASAN	· · · · ·			JENIS T	JENIS TEMBAKAU: TBN FFIN	JENIS TEMBAKAU: TBN /FIN. MTT. 2004 / 2005		PENATARAN : (HOWG /CU/CO).
000	NAMA	NAMA	NO.	KELAS	LUAS	S(HA)		BIAYA IPL (RP)	RP)	
		BLOK	の世子を成一十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十	TANAH	PIPIL	UKUR	IPL	PPH 10 %	DITERIMA	ANUA - IANGAN
-										
2										6
60					*				6	m
4										0
5	P. HASiB.	4. Kulonh	D	1/3	0602	Orge.	308/300	30g/32	273.12.	S By
9	P. HABiB.	=	99	IL	6310	0.19	Ba2020.	देश अध्य	730 827	6 My
7	P. HB135/B.	4	07		0,109.	0/10	\$7.2 OD	57.70	A. 500	1 38 1
8	P. HHBIB.	,	800	38	0,047	0094.	227480	22 749	SC4. 732.	I Note & More
0					/				1	0
0										10
										11
12										12
13										13
14								7		14
15								-2		15. ( )
	JUMLAH			The second secon	0.872	0,880	4.647.820	464.783	4.103.047	1
TATA	CATATANTIAN WABUPATE, NEW KEPALA DESA NEPALA DESA NEPALA DESA NEPALA DESA NEPALA DESA NEW		E S		MENG	MENGETAHUI;			LOKASI-TBN-L DIBL	DIBUAT OLEH;  DIBUAT OLEH;  SAME ABS.
	AMATAN T				DENIKA	CICKLUA TARIABBAR	-			

3 1.	(PERSERO) KEBUN AJONG GAYASAN	SAN		PENYE	RAHAI	PENYERAHAN DAN PENGGARAPAN LAHAN	DAN PENGGAR	ERAHAN DAN PENGGARAPAN LA	LAHAN		B	PENATARAN : (HOUK: / LUICO A.
	M A MA A	ALA	ALAMAT	S S	N N	LUAS	S		BATAS	BATAS - BATAS		NACINAT AGNAT
	<	DESA	KECAMATAN	Charge PERSIL	PERSIL	PIPIL	UKUR	UTARA	SELATAN	BARAT	TIMUR	NICONICI CONICI
			1									1.
												2.
A COLUMN THE PARTY OF THE PARTY												ri
THE RESERVE OF THE PARTY OF THE												4.
A CONTRACTOR OF THE PARTY OF TH	P. HAGOIB.	Have.	gane	50		0602	0.596.	B. Siviri . P. HABSIS		REXAD -	B.57UM.	5.
and other Designation of the last	P. HABIB.	FONE	FONE	90		0164	OND.	P. HAGI'S.	PHABAIB.	PASKON	Ple	6.
	P. HABIB.	Gave	fanc	160		0,104	0/10.	PHABOIR.	P.H98aiB.	P. ANTEN.	PUVO.	7.
Desired the Party of the Party	P. HARis.	SHOWE	Princ.	.80		600	0,004	Popularie.	PHABIS SCUESA SCUESA.	SULTAN.	PJ.	8.
CONTRACTOR PRODUCT												6
THE R. P. LEWIS CO., LANSING												10.
THORNES THORNES	JUMLAH					0,973.	0,899					
-d Pro	POOAT-TBVBLKAATRA-2						->-			J. OMNBT	Will TGL.	3- & 2009.

PTP NUSANTARA X
Kebun : Ajung Gayasan
Baglan : E84701

DAFTAR PERMINTAAN UANG

BK No. : 02260542 Tgl : 26 FEB 2004

Tanggal		KETERANGAN		No. Kode Perkiraan	Pengeluaran Rp.	Penerimaan Rp.
	Pembayara	an PPh bln. Pebrua	7ri 2004			
	7 0.110701					
	- Pph. Ps	. 21				
	Karyawa	an keb. Hjung Gard	7520	16000	4.207.785	
	- PPh. Pc	The state of the s				
	Sevo k	computer		16400	120.000	
	- PPh DE	4 27ei (2)				
		Than Untuk TIBM		16210	103.889.613	
				1670		
	/		7 8			
						1988
			THE OWNER OF THE PROPERTY OF T			
					A	
	TELA	H DITERIMA / DISETOR	1			
	Mp.//	Feet Stat				
	1 25/200	6.10/370 J U				
				1		
	Contract a contract or contrac			1		7
		Jum	lah / Dipindahkan	'	108.107.398	man register, such san and sada scream should be
			Penerimaan		and the state of t	
RBILAI	NG BOOK		lah kebutuhan ua		108.187.398	n 7778
	engeluaran / F	lug Ciclopan Jung G S Sembelon Pulgh Penerimaan disusun per pen	- N¢(a Q₹N - r nataran	upiāh,		
	ujui oleh :	Dibayarkan / Dibukukan Buku Kas oleh :		ukan oleh :	, P	enerima
1				P.	MZ	77
	7			4.	XV	7/
Admi	inistratur	.TUK (Kantor)			1	Pemilik



Vama

larnat

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PAJAK KANTOR WILAYAH KANTOR PELAYANAN PAJAKE JAWA TIMUR

487,567-487845

JEMBER **BUKTI PENERIMAAN SURAT** 

Facsimile:

486344

Nomor :

S-672/WPJ.12/KP.1006/MSP21/2004

PENYAMPATAN SPT MASA PPN PASAL 4 NRWP (2): PT PERKEBUNAN NUSANTAKA Y DID I ELIMAKAH No. P.K.P

JL. BONDOWOSO TROPO F . T SH TO JET BUE

en's Pajak TEMPHER PPh Pacal de acat (2) got

Tandest Masuk SPT

P. PDIP 3. 16. - 96

Ms/Thn Pajak: EUANGAN REPU FEB 2004

# DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DEREKTORAT JENDERAL PAJAK

# DAFTAR BUKTI PEMOTONGAN /PEMUNGUTAN PPh PASAL 4 AYAT(2) MASA : PEBRUARI 2004

Tanggal  3 4 4 4 6 6 6 6 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7	Nomor (Rp)	LLLI yallig dipololig/dipulgul
gian TBN - II 25-02 gian TBN - III 25-02 gian TBN - IV 25-02 gian TBN - VI 25-02 gian TBN - XI 25-02		(Rp)
gian TBN - III 25-02 gian TBN - III 25-02 gian TBN - IV 25-02 gian TBN - V 25-02 gian TBN - VIII 25-02 gian TBN - VIII 25-02 gian TBN - XII 25-02	5 6	7
gian TBN - II 25-02 gian TBN - III 25-02 gian TBN - IV 25-02 gian TBN - VI 25-02 gian TBN - VI 25-02 gian TBN - VI 25-02 gian TBN - XI 25-02		
gian TBN - III 25-02 gian TBN - III 25-02 gian TBN - IV 25-02 gian TBN - VI 25-02 gian TBN - VII 25-02 gian TBN - VII 25-02 gian TBN - XII 25-02		
Ajung, Jember Bagian TBN - III 25-02- Ajung, Jember Bagian TBN - IV 25-02- Ajung, Jember Bagian TBN - V 25-02- Ajung, Jember Bagian TBN - VI 25-02- Ajung, Jember Bagian TBN - VII 25-02- Ajung, Jember Bagian TBN - XI 25-02- Ajung, Jember Bagian TBN - XII 25-02- Aj	180,505,380	0 18.050.538
gian TBN - III 25-02 gian TBN - V 25-02 gian TBN - VI 25-02 gian TBN - VII 25-02 gian TBN - XII 25-02 gian TBN - X 25-02 gian TBN - X 25-02 gian TBN - XII 25-02 gian TBN - XII 25-02	73,843,110	
gian TBN - IV 25-02 gian TBN - VI 25-02 gian TBN - VII 25-02 gian TBN - VIII 25-02 gian TBN - XII 25-02	11,110,330	
gian TBN - V gian TBN - VI gian TBN - VII gian TBN - VIII 25-02 gian TBN - X gian TBN - XII 25-02 gian TBN - XII 25-02	75,001,190	7,500
gian TBN - VI 25-02- gian TBN - VII 25-02- gian TBN - X 25-02- gian TBN - XII 25-02-	16,512,980	
gian TBN - VIII 25-02- gian TBN - XII 25-02- gian TBN - XI 25-02- gian TBN - XII 25-02- gian TBN - XII 25-02- gian TBN - XII 25-02- gian TBN - XIII 25-02-	8,240,980	
gian TBN - VIII 25-02- gian TBN - X gian TBN - X gian TBN - XII 25-02-	46,312,860	0 4,631,286
gian TBN - IX 25-02- gian TBN - XI 25-02- gian TBN - XII 25-02- gian TBN - XIII 25-02- gian TBN - XIII 25-02- gian TBN - XIV 25-02-	37,332,570	
gian TBN - X gian TBN - XII 25-02- gian TBN - XIII 25-02- gian TBN - XIV 25-02-	21,760,530	
gian TBN - XII 25-02- gian TBN - XIII 25-02- gian TBN - XIV 25-02-	50,707,360	
gian TBN - XIII 25-02- gian TBN - XIV 25-02-	217,729,380	2
gian TBN - XIII 25-02-	002'699'62	0 26,986,7
gian TBN - XIV 25-02-	42,192,370	
Jumlah 3. PPh yang dipotong pihak lain	177,677,390	0 17,767,739
3. PPh yang dipotong pihak lain	1,038,596,130	103.859.613
S. Frii yang upotong pinak lam		
2		
COLD TO THE PROPERTY OF THE PR		

Jember, 04 Maret 2004

Pemotong/Pemungut Pajak/Wajib Pajak NPWP : 01.061.130.9.626.004

. PTP.NUSANTARA X (PERSERO) KEB. AJONG GAYASAN 



DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

Lembar ke-1 untuk : Kantor Pelayanan Pajak Lembar ke-2 untuk : Pemotong Pajak

Yth.	Kepahar Pelayanan Pajak	
	.J.a.m.b.a.r(1)	)
di		

SURAT PEMBERITAHUAN (SPT) MASA PPh PASALE4 AYAT (2)

	SORAT PEMBERITATION	it (of 1) ith		<b>对外</b> 名626	
A. Ide	ntitas Pemotong/Wajib Pajak:				
NP	WP 0 1 : 0 5 1. 1 3 0	9 6	26-004		(2)
	maPTP. NUSANTARA X (PERS	ERO) KER	UN AJONG GAYA	BAN	
AI	amavl. M.H. Thamrin 143,	AJUIK, O	Pehruari		
B. Paj	ak Penghasilan Pasal 4 ayat (2) yang telah d 2004 (3) dan telah disetor tangga	02-2004	gui/terutang onto k masa (4) adalah s		
	URAIAN	MAP/KJS	Nital Object Talak		LBehvang dipotong/ falpunguvelsetonsendiri (LB) va(Rp) ii
	(1)	(2)	(3)7176139	(4) ES (4)	(5)
SBI da a. Waj - Ya - Ya	Deposito/Tabungan, Diskonto in Jasa Giro: ib pajak Dalam Negeri ing ditempatkan di DN ing ditempatkan di LN	0118/404	-		
2. Transs	ib Pajak Luar Negeri aksi Penjualan Saham : am Pendiri	0.110/106	940		
	am Pendiri	0118/406			
	aksi Penjualan Obligasi	0118/406			
	ahan Hadiah Undian	C118/405	950		
6. Persew	yaan Tunah dan Atau Bangunan Penyewa sebagai Pemotong Pajak) yaan Tunah dan Atau Bangunan WP yang bergerak dibidang Usaha	0118/403	1.038.596.130	10	103.859.613
Persew a. PPh	yaan atas Tanah dan/atau Bangunan): yang disetor sendiri yang dipotong oleh pihak lain	0118/403	-		
7. Penyer Sebags	ahan Jasa Konstruksi (Bagi Penerima Jasa ii Pemotong Pajak)	0118/409	Bully		
yang b	shan Jasa Konstruksi (Bagi Wajib Pajak ergerak di bidang usaha jasa konstruksi) yang disetor sendiri	0118/409	1/1		
	yang dipotong oleh pihak lain	0110/407	***************************************		
Terbilahi	JUMI eratus tiga juta delapan iga belas rupiah		tmu puluk semb	ilm r	103,859,613
C. Lar X (	npiran: (5)  ) Surat Setoran Pajak sebanyak	Ph Pasai 4 ay sai 4 ayat (2) s njualan Sahan	ebanyāk lembai 1 Dan Atau Obligasi per	hari.	n Saham Dan Atau Obligas
D. Per	nyataan:				
Den	gan ini saya menyatakan bahwa pemberitah	uan di atas ada	alah benar, lengkap dan i	tidak bersya	rat.
			Jember	04 M	aret 04
		KIBIHI X	Weimotong Pajak / Wi	nama dan	Kuasa (7) S
F.1.1.32.04		lax.	Tr. SUGI	ANTO	
		PERSER	Adminis	tatur	(8)

Lembar ke-1: untuk yang menyewakan Lembar ke-2: untuk Kantor Pelayanan Pajak

Lembar ke-3: untuk penyewa

#### BUKTI PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN ATAS PERSEWAAN TANAH DAN/ATAU BANGUNAN (FINAL)

Nomor:

Telah dilakukan pemotongan PPh atas persewaan tanah dan/atau	bangunan	terhadap
--	----------	----------

Nama Wajib Pajak

NPWP

OO.000.000.05626.000

Ajung, Jember

Lokasi tanah dan/atau bangunan

Tempurejo, Jember

JUMLAH BRUTO NILAI SEWA	TARIF	PPh YANG DIPOTONG
Rp. 180 : 505 : 380	<del>6 %</del> /10 % °)	Rp. 18 :050 :538

KEEVIA

Alu Ma Ouvis

ANSER O

Jember 25 Pebruari 2004

Pemotong Pajak,

Nama : KEBUN AJONG GAYASAN

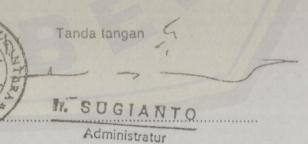
01.061.130.9.626.004

Alamai Jl. M.H. Thamrin 143, Ajung

Jember

#### Perhatlan:

- Pajak Penghasilan yang dipotong bukan merupakan kredit pajak;
- 2. Harap diisi dengan benar dan lengkap;
- 3. \*) coret yang tidak perlu



#### Digital Repository Universitas Jember

Lampiran I SE-22/PJ.4/1996 Tgl. 14 Juni 1996

Lembar ke-1: untuk yang menyewakan Lembar ke-2: untuk Kantor Pelayanan Pajak

Lembar ke-3: untuk penyewa

#### BUKTI PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN ATAS PERSEWAAN TANAH DAN/ATAU BANGUNAN (FINAL)

Nomor:

Telah dilakukan pemotongan PPh atas persewaan tanah dan/atau bangunan terhadap :

Nama Wajib Pajak BAGIAN TBN — II

NPWP 00.000.000.00.1626.000

Alamat Ajung, Jember

Lokasi tanah dan/a:au bangunan : Mumbulsari, Jember

JUMLAH BRUTO NILAI SEWA	TARIF	PPh YANG DIPOTONG
Rp. 73.843.110	<del>8%</del> 10%*)	Rp. 7.384.311

KEDUN

AJD 04 Cayes

PERSER

Jember 25 Pebruari 204

Pemotong Pajak,

Nama : PTP NUSANTARA X (PERSERO)

NPWP 01:061:130.9:526.004

Alamai Jl. M.H. Thamrin 143, Ajung

Tanda tangan

Jember

Perhatian :

(:)

1. Pajak Penghasilan yang dipotong bukan merupakan kredit pajak;

Harap diisi cengan benar dan lengkap;

3. \*) coret yang tidak perlu.

Tr. SUGIANTO

Administratur

Lembar ke-1: untuk yang menyewakan Lembar ke-2: untuk Kantor Pelayanan Pajak

Lembar ke-3: untuk penyewa

#### BUKTI PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN ATAS PERSEWAAN TANAH DAN/ATAU BANGUNAN (FINAL)

Nomor:....

Telah dilakukan pemotongan PPh atas persewaan tariah dan/atau bangunan terhad
---

Nama Wajib Pajak

NPWP

OO.000.000.000.626.000

Alamat

Ajung, Jember

Lokasi tanah dan/atau bangunan

Jenggawah, Jember

JUMLAH BRUTO NILAI SEWA	TARIF	PPh YANG DIPOTONG
Rp. 11.110.330	ত <sup>−</sup> ক10%°)	Rp. 1.111.033

Jember 25 Pebruari 2004

Pernotong Pajak,

ma PTP. NUSANTARA X (PERSERO)
KEBUN AJONG GAYASAN

PWP 01.061:130.9:626:004

Mamat Jl. M.H. Thamrin 143, Ajung

Jember

# KESUR X AJO DU ORYGINA POR TERSERO

Tanda tangan

Ir. SUGIANTO

Administratur

#### Perhatian:

- 1. Pajak Penghasilan yang dipotong bukan merupakan kredit pajak;
- Harap diisi dengan benar dan lengkap;
- 3. \*) coret yang tidak perlu

Lembar ke-1: untuk yang menyewakan Lembar ke-2: untuk Kantor Pelayanan Pajak

Lembar ke-3: untuk penyewa

#### BUKTI PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN ATAS PERSEWAAN TANAH DAN/ATAU BANGUNAN (FINAL)

Nomor	:	
-------	---	--

Telah dilakukan pemotongan PPh atas persewaan tanah dan/at	u bangunan terhadap:
--	----------------------

Nama Wajib Pajak

DAGIAN TBN - IV

OO.000.000.00.626.000

Alamat

Lokasi tanah dan/atau bangunan

Jenggawah, Jember

JUMLAH BRUTO NILAI SEWA	TARIF	PPh YANG DIPOTONG
Rp. 75.001.190	<del>575/</del> 10 % *)	Rp. 7.500.119

Jember 25 Pebruari 2004

Pemotong Pajak,

Nama PTP. NUSANTARA X (PERSERO)

NPWP 01:061:130:9:626:004

Alamat : Jl. M.H. Thamrin 143, Ajung

Jember

# Aju ay Oeyes

Tanda tangan

Ir. SUGIANTO

Administratur

#### Perhatian:

- 1. Pajak Penghasilan yang dipotong bukan merupakan kredit pajak;
- Harap diisi dengan benar dan lengkap;
- 3. \*) coret yang tidak perlu.

Lembar ke-1: untuk yang menyewakan Lembar ke-2: untuk Kantor Pelayanan Pajak

Lembar ke-3: untuk penyewa

#### BUKTI PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN A'TAS PERSEWAAN TANAH DAN/ATAU BANGUNAN (FINAL)

Nomor:....

Telah dilakukan s	pemolongan	PPh a	itas	persewaan	tanah	dan/atau	bangunan	terhadap	:

Nama Wajib Pajak

BAGIAN TBN - V

NPWP

00.000.000.0:626.000

Alamat

Ajung, Jember

Lokasi tanah dan/atau bangunan

Jenggawah, Jember

JUMLAH BRUTO NILAI SEWA	TARIF	PPh YANG DIPOTONG
Rp. 16.512.980	<del>*************************************</del>	Rp. 1:651:298

Jember 25 Pebruari 2004

Pemotong Pajak,

Nama

PTP. NUSANTARA X (PERSERO) KEBUN AJONG GAYASAN

.....

01:061:130:9:626:004

Jl. M.H. Thamrin 143, Ajung

Je m b e r

Ale soor ass

Tanda tangan

Mr. S.U.G.I.A.N.T.O.

Administratur

#### Perhatian:

- Pajak Penghasilan yang dipolong bukan merupakan kredit pajak;
- Harap diisi dengan benar dan lengkap;
- 3. \*) coret yang tidak perlu.

Lembar ke-1: untuk yang menyewakan Lembar ke-2: untuk Kantor Pelayanan Pajak

Lembar ke-3: untuk penyewa

#### BUKTI PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN A'TAS PERSEWAAN TANAH DAN/ATAU BANGUNAN (FINAL)

Nomor:.....

Telah dilakukan	pemolongan	PPh	alas	persewaan	tanah	dan/atau	bangunan	terhadap	:
-----------------	------------	-----	------	-----------	-------	----------	----------	----------	---

Nama Wajib Pajak

NPWP

OO.000.000.0:626.000

Ajung, Jember

Lokasi tanah dan/atau bangunan

Ajung, Jember

JUMLAH BRUTO NILAI SEWA TARIF PPH YANG DIPOTONG

Rp. 8.240.980 =8.7/10 % \*) Pp. 824.098

Jember 25 Pebruari 2004

Pemotong Pajak.

Nama PTP NUSANTARA X (PERSERO)

PWP 01:061:130:9:626:004

Jl. M.H. Thamrin 143, Ajung

Jember

KEBUB KEBUB

Tanda tangan

Perhatlan:

- Pajak Penghasilan yang dipotong bukan merupakan kredit pajak;
- Harap diisi dengan benar dan lengkap;
- 3. \*) coret yang tidak perlu.

Lembar ke-1: untuk yang menyewakan Lembar ke-2: untuk Kantor Pelayanan Pajak

Lembar ke-3: untuk penyewa

#### BUKTI PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN ATAS PERSEWAAN TANAH DAN/ATAU BANGUNAN (FINAL)

Nomor:

Telah dilakukan pemotongan PPh atas persewaan tanah dan/atau bangunan terhadap :

Nama Wajib Pajak

BA GIAN TBN - VII

NPWP

00.000.000.0.626.000

Alamat

Ajung, Jember

Lokasi tanah dan/atau bangunan

Ajung, Jember

JUMLAH BRUTO NILAI SEWA	TARIF	PPh YANG DIPOTONG
Rp. 46:312:860	<del>6 %/</del> 10 % *)	Rp4.631:286

Jember 25 Pebruari 2014

Pemotong Pajak,

Nama

PTP. NUSANTARA X (PERSERO) KEBUN AJONG GAYASAN

NPWP

01.061.130.9.626.004

Alamat

Jl.M.H. Thamrin 143, Ajung

Jember

Tanda tangan

#### Perhatian:

- Pajak Penghasilan yang dipotong bukan merupakan kredit pajak;
- Harap diisi dengan benar dan lengkap;
- 3. \*) coret yang tidak perlu.

In SUGIANTO

Administratur

Lembar ke-1: untuk yang menyewakan Lembar ke-2: untuk Kantor Pelayanan Pajak

Lembar ke-3: untuk penyewa

#### BUKTI PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN ATAS PERSEWAAN TANAH DAN/ATAU BANGUNAN (FINAL)

Nomor		 	 	
14011101	*****	 	 *******	

Telah	dilakukan	pemotongan	PPh atas	nersewaan	tanah	dan/atau	hangunan	terhadan
I Glan	Ullakukali	pernotongan	rrii dido	heisewaan	lanan	ualvalau	varigunan	tollia dat

Nama Wajib Pajak : BAGIAN. TBN - VIII

NPWP 00:000:000:05626:000

Alamat Ajung, Jember

Lokasi tanah dan/atau bangunan : Ajung, Jember

JUMLAH BRUTO NILAI SEWA	TARIF	PPh YANG DIPOTONG
Rp. 37.332.570	<del>6</del> %/10 % *)	Rp. 3.733.257

Jember 25 Pebruari 2004

Pemotong Pajak,

Nama PTP. NUSANTARA X (PERSERO)

Alamai . Jl.M.H. Thamrin 143, Ajung

Jember

Ale se Care

KEEDIS

Tanda tangan

Perhatian:

- Pajak Penghasilan yang dipotong bukan merupakan kredit pajak;
- 2. Harap diisi dengan benar dan lengkap;
- 3. \*) coret yang tidak perlu.

Tr. SUGTANTO

Administratur

54

Lembar ke-1: untuk yang menyewakan Lembar ke-2: untuk Kantor Pelayanan Pajak

Lembar ke-3: untuk penyewa

#### BUKTI PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN ATAS PERSEWAAN TANAH DAN/ATAU BANGUNAN (FINAL)

Nomor:

Telah dilakukan p	pemolongan	PPh alas	persewaan	tanah	dan/atau	bangunan	terhadap:
-------------------	------------	----------	-----------	-------	----------	----------	-----------

NPWP

DO.000.000.00.626.000

Alamat

Ajung, Jember

Lokasi tanah dan/atau bangunan

Jenggawah, Jember

JUMLAH BRUTO NILAI SEWA	TARIF	PPh YANG DIPOTONG
Rp. 21.760.530	<del>8%</del> 10%°)	Rp. 22176.053

Jember 25 Pebruari 2004

Pemotong Pajak,

PTP. NUSANTARA X (PERSERÐ)

KEBUN AJONG GAYASAN

NPWP 01:061:130:9:626:004

Alamat : Jl.M.H. Thamrin 143, Ajung

Jember

MESUN X MESUN X AJO MO OFFERSERO

Tanda tangan

#### Perhatian:

- 1. Pajak Penghasilan yang dipotong bukan merupakan krecit pajak;
- Harap diisi dengan benar dan lengkap;
- 3. \*) coret yang tidak perlu.

Administratur

Lembar ke-1: untuk yang menyewakan Lembar ke-2: untuk Kantor Pelayanan Pajak

Lembar ke-3: untuk penyewa

#### BUKTI PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN ATAS PERSEWAAN TANAH DAN/ATAU BANGUNAN (FINAL)

Nomor:....

Telah dilakukan pemoto	ongan PPh atas persew	vaan tanah dan/atai	bangunan terhadap :
------------------------	-----------------------	---------------------	---------------------

Nama Wajib Pajak BAGIAN TBN — X

NPWP : 00,000,000,03626,000

Alamat Ajung, Jember

Lokasi lanah dan/alau bangunan : Jenggawah, Jember

JUMLAH BRUTO NILAI SEWA	TARIF	PPh YANG DIPOTONG
Rp. 50.707.360	<del>ए ५१।</del> ० % °)	Rp. 5.070:736

Jember 25 Pebruari 2004

Pemotong Pajak,

Nama : PTP NUSANTARA X (PERSERO)

NPWP .01:061:130.9:626:004

Alamat Jl.M.H. Thamrin 143, Ajung

Jember

Tanda tangan

#### Perhatian:

- 1. Pajak Penghasilan yang dipotong bukan merupakan kredit pajak;
- Harap diisi dengan benar dan lengkap;
- 3. \*) coret yang tidak perlu.

I SUGIANTO

Administratur

Lembar ke-1: untuk yang menyewakan Lembar ke-2: untuk Kantor Pelayanan Pajak

Lembar ke-3: untuk penyewa

#### BUKTI PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN ATAS PERSEWAAN TANAH DAN/ATAU BANGUNAN (FINAL)

Nomor:....

Telah dilakukan pemotongan PPh atas persewaan tanah dan/atau bangunan terhadap :

Nama Wajib Pajak : BAGIAN TBN - XI

NPWP : 00,000,000,00626.000

Alamat Ajung, Jember

Lokasi tanah dan/atau bangunan : Ajung, Jember

JUMLAH BRUTO NILAI SEWA	TARIF	PPh YANG DIPOTONG
Rp. 217.729:380	<del>টি ক</del> ী10 % °)	Rp. 21:772.938

Jember 25 Pebruari 2004

Pemotong Pajak,

PTP. NUSANTARA X. (PERSERO)

Vama : KEBUN AJONG GAYASAN .....

NPWP 01.0617130.97626.004

Alamat : Jl.M.E. Thamrin 143, Ajung

Jember

AJO VSC BYRDE

KEZUM

Tanda tangan

#### Perhatian:

- 1. Pajak Penghasilan yang dipotong bukan merupakan kredit pajak;
- Harap diisi dengan benar dan lengkap;
- 3. \*) coret yang tidak perlu.

Administrat

Lembar ke-1: untuk yang menyewakan Lembar ke-2: untuk Kantor Pelayanan Pajak

Lembar ke-3: untuk penyewa

#### BUKTI PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN ATAS PERSEWAAN TANAH DAN/ATAU BANGUNAN (FINAL)

Nomor:....

Telah dilakukan pen	molongan PPh ala	s persewaan tana	ah dan/atau	bangunan	terhadap:
---------------------	------------------	------------------	-------------	----------	-----------

BAGIAN TBN - XII Nama Wajib Pajak NPWP 00,000,000,0.626,000 Ajung, Jember Alamat Ajung, Jember Lokasi tanah dan/atau bangunan

JUMLAH BRUTO NILAI SEWA	TARIF	PPh YANG DIPOTONG
Rp. 79.669.700	<del>5 %7</del> 10 % °)	Rp. 7.966.970

KEBUR

Jember

Pebruari Pemotong Pajak,

Jl.M.H. Thamrin 143, Ajung

PTP. NUSANTARA X (PERSERÐ) KEBUN AJONG GAYAS AN 01.061.130.9.626.004

Tanda tangan C

Jember

Perhatian:

- 1. Pajak Penghasilan yang dipotong bukan merupakan kredit pajak;
- 2. Harap diisi dengan benar dan lengkap;
- 3. \*) coret yang tidak perlu.

Ir. SUGIANTO Administratur

Lembar ke-1: untuk yang menyewakan Lembar ke-2: untuk Kantor Pelayanan Pajak

Lembar ke-3: untuk penyewa

#### BUKTI PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN ATAS PERSEWAAN TANAH DAN/ATAU BANGUNAN (FINAL)

Nomor	:

Telah dilakuka	n pemotongan	PPh ata	s persewaan	tanah	dan/atau	bangunan	terhadap:	
----------------	--------------	---------	-------------	-------	----------	----------	-----------	--

BAGIAN TBN - XIII Nama Wajib Pajak

00,000,000;0.626;000 NPWP

Ajung, Jember Alamat

Rambipuji, Jember Lokasi tanah dan/atau bangunan

JUMLAH BRUTO NILAI SEWA	TARIF	PPh YANG DIPOTONG
Ap. 42.192.370	চ <i>ৰ্</i> জা০ % °)	Rp. 4.219.237

PERSE!

25 Pebruari

Pemotong Pajak,

PTP. NUSANTARA X (PERSERO) KEBUN AJONG GAYASAN Nama

01,061,130,9,626,004

Jl.M.H. Thamrin 143, Ajung

Jember

Perhatlan:

1. Pajak Penghasilan yang dipotong bukan merupakan kredit pajak;

2. Harap diisi dengan benar dan lengkap;

3. \*) coret yang tidak perlu.

Tanda tangan

W. S.D.G.I.A.N.T.O. Administratur

Lembar ke-1: untuk yang menyewakan Lembar ke-2: untuk Kantor Pelayanan Pajak

Lembar ke-3: untuk penyewa

#### BUKTI PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN ATAS PERSEWAAN TANAH DAN/ATAU BANGUNAN (FINAL)

Nomor:.....

Telah dilakukan pemotongan PPh atas persewaan tanah dan/atau bangunan terhadap :

BAGIAN TBN - XIV Nama Wajib Pajak

00.000.000:0:626.000 NPWP

Ajung, Jember Alamat

Jenggawah, Jember Lokasi tanah dan/atau bangunan :

JUMLAH BRUTO NILAI SEWA	TARIF	PPh YANG DIPOTONG
Rp. 177.677.390	<del>6%</del> /10 % °)	Rp. 17.767.739

25 Pebruari Jember

Pemotong Pajak,

PTP. NUSANTARA X (PERSERO) Nama

KEBUN "AJONG GAYASAN "

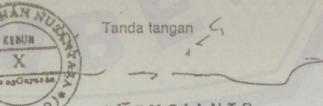
01.061.130.9.626.004 NPWP

Jl.M.H. Thamrin 143, Ajung Alamat

Jember

#### Perhatian:

- 1. Pajak Penghasilan yang dipotong bukan merupakan kredit pajak;
- 2. Harap diisi dengan benar dan lengkap;
- 3. \*) coret yang tidak perlu.



W SUGIANTO Administrat

58



DEPARTEMEN KEUANGAN R.I. DIREKTORAT JENDERAL PAJAK KANTOR PELAYANAN PAJAK

SURAT SETORAN PAJAK (SSP)

LEMBAR Untuk Arsip WP

JEMBER

NPWP : 01 . 061 . 130 . 9 - 626 . 004		
Diisi sesuai dengan Nomor Pokok Wajib Pajak yang dimiliki		
NAMA WP PTP NUSANTARA X (PERSERO) KEBUN AJONG GAYASAN		
ALAMAT Jl. M.H. Thamrin 143, Ajung,		
Jember		
MAR/Kode Jenis Pajak Kode Jenis Seteran Uraian Pembayaran		
PPh.Ps. 4 ayat(2) Final atas sewa lahan		
0 1 1 8 4 0 3 untuk Bagian : TBN-I, TBN-II, TBN-III, TBN-VIII, TBN-VIII, TBN-VIII, TBN-XIII, TBN-XIII, TBN-XIII;		
Masa Pajak TBN-XIV.  Tahun		
Jan DEB Mar Apr Mei Jun Jul Ags Sep Okt Nop Des		
Beri tanda silang pada salah satu kolom bulan untuk masa yang berkenaan  Diisi tahun terutangnya pajak		
Nomor Ketetapan :		
Diisi sesuai Nomor Ketetapan : STP, SKPKB, SKPKBT		
Jumlah Pembayaran  Diisi dengan rupiah penuh  Terbilang : SERATUS TIGA JUTA DELAPANRATUS		
Rp. 103.859.613,- LIMAPULUH SEMBILAN RIBU ENAMRATUS TIGABENAS RUPIAH.		
Diterima oleh Kantor Penerima Pembayaran Wajib Pajak / Penyetor		
Tanggal tgl		
Cap dan tanda tangan Cap dan tanda tangan		
Michigan - Comment of the constraint of the cons		
Nama Jelas: Ir. SUGIANTO Administratur		
Ruang Validasi Kantor Penerima Pembayaran		
Diisi sesuai buku penunjuk pengisian		

F.2.0.32.01